



LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
ASERSI FINAL

2023

UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ix
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
II. NERACA	6
III. LAPORAN OPERASIONAL	7
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. PENJELASAN UMUM	9
A.1. DASAR HUKUM	9
A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	9
A.3. RENCANA STRATEGIS	12
A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	16
A.5. BASIS AKUNTANSI	16
A.6. DASAR PENGUKURAN	17
A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	24
B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	24
B.2. BELANJA NEGARA	26
B.2.1. BELANJA PEGAWAI	27
B.2.2. BELANJA BARANG	28
B.2.3. BELANJA MODAL	30
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	31
C.1. ASET LANCAR	31
C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	31
C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	32
C.1.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA	32
C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK	32

C.1.5. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK	32
C.1.6. PERSEDIAAN	33
C.2. ASET TETAP	33
C.2.1. PERALATAN DAN MESIN	34
C.2.2. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	36
C.2.3. ASET TETAP LAINNYA	37
C.2.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	37
C.3. ASET LAINNYA	37
C.3.1. ASET TAK BERWUJUD	37
C.3.2. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	38
C.3.3. ASET LAIN-LAIN	38
C.3.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	39
C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	40
C.4.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	40
C.4.2. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	41
C.5. EKUITAS	41
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	42
D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	42
D.2. BEBAN PEGAWAI	42
D.3. BEBAN PERSEDIAAN	43
D.4. BEBAN BARANG DAN JASA	43
D.5. BEBAN PEMELIHARAAN	44
D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS	44
D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	45
D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	45
D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	46
D.10. KEGIATAN NON OPERASIONAL	46
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	47
E.1. EKUITAS AWAL	47
E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO	47
E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	48
E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS	48
E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	48
E.6. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	48

E.7. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG	49
E.8. EKUITAS AKHIR	49
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	50
F.1. REKENING PEMERINTAH	50
F.2. PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023	50
F.3. REALISASI BELANJA AKUN KHUSUS COVID-19 PERIODE SEMESTER II TAHUN 2023	54
F.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	54
F.4.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA	54
F.4.2. TRANSFER MASUK	54
F.4.3. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN	54
F.4.4. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI	55
F.4.5. TRANSAKSI RESIPROKAL	57
F.4.6. INFORMASI TUNTUTAN HUKUM	57
LAMPIRAN PENDUKUNG	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	2
Tabel 3 Kualitas Piutang	19
Tabel 4 Masa Manfaat Aset Tetap	21
Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	22
Tabel 6 Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2023	24
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023	25
Tabel 8 Perbandingan Rincian Realisasi PNBK 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	25
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2023	26
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023	26
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	27
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	28
Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	29
Tabel 14 Belanja barang untuk Penanganan Pandemi Covid 19 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	30
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	31
Tabel 16 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	31
Tabel 17 Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	33
Tabel 18 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	33
Tabel 19 Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin	34
Tabel 20 Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin	35
Tabel 21 Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin	35
Tabel 22 Rincian Mutasi Saldo Jaringan, Irigasi dan Jaringan	36
Tabel 23 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023	37
Tabel 24 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	37
Tabel 25 Rincian Transaksi Aset tak Berwujud per 31 Desember 2023	38
Tabel 26 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	39
Tabel 27 Mutasi Aset Lain-Lain	39
Tabel 28 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023	40
Tabel 29 Rincian Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	40
Tabel 30 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023	41

Tabel 31 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022	41
Tabel 32 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	42
Tabel 33 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	42
Tabel 34 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	43
Tabel 35 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	43
Tabel 36 Rincian Barang Jasa Penanganan Pandemi	44
Tabel 37 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	44
Tabel 38 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	45
Tabel 39 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	46
Tabel 40 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	46
Tabel 41 Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	47
Tabel 42 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas	48
Tabel 43 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	49
Tabel 44 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	49
Tabel 45 Rincian Pengesahan Hibah	49
Tabel 46 Program/Kegiatan dalam PN I dan Fungsi APBN Ekonomi 04	50
Tabel 47 Rincian Realisasi Belanja Akun Khusus COVID-19 pada Periode Semester II Tahun 2023	54
Tabel 48 Transaksi Resiprokal	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Risalah Lelang Nomor 718/25/2023
Lampiran II	Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran III	Rincian Kas dan Setara Kas
Lampiran IV	Rincian atas Piutang Bukan Pajak dan Perhitungan Penyisihannya
Lampiran V	Daftar Belanja yang Masih Harus Dibayar
Lampiran VI	Saldo Daftar Utang Pajak Belum Disetor
Lampiran VII	BAST Nomor 93/SJ-IND.6/BMN/BA/III/2023
Lampiran VIII	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran IX	Neraca
Lampiran X	Laporan Operasional
Lampiran XI	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran XII	Barang Milik Negara
Lampiran XIII	Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Intrakomptabel
Lampiran XIV	Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Ekstrakomptabel
Lampiran XV	Laporan Barang Pengguna Tingkat KL Aset Tak Berwujud
Lampiran XVI	Monitoring dan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian s.d. 31 Desember 2023



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian




Airlangga Hartarto



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Mei 2024
Inspektur



Mirza S. Mashudi

EXECUTIVE SUMMARY

RINGKASAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp243.841.124,00. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp519.230.088.328,00 atau sebesar 99,02% dari alokasi anggaran sebesar Rp524.390.687.000,00.

Ringkasan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1
Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Negara dan Hibah	-	243.841.124		-	1.802.322.673	-
2	Belanja Negara	524.390.687.000	519.230.088.328	99,02%	438.832.116.000	434.688.843.042	99,06%

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per tanggal pelaporan. Nilai Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp42.670.632.453,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp917.216.774,00, Aset Tetap sebesar Rp26.785.926.360,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp14.967.489.319,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp13.003.139.364,00 dan Rp29.667.493.089,00.

Ringkasan perbandingan Neraca per 31 Desember 2023 dengan Neraca 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar	917.216.774	607.154.212	310.062.562	51,07%
Aset Tetap	26.785.926.360	20.226.931.500	6.558.994.860	32,43%
Aset Lainnya	14.967.489.319	2.015.275.250	12.952.214.069	642,70%
Jumlah Aset	42.670.632.453	22.849.360.962	19.821.271.491	86,75%
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	13.003.139.364	5.497.508.762	7.505.630.602	136,53%
Ekuitas Dana			0	
Ekuitas	29.667.493.089	17.351.852.200	12.315.640.889	70,98%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	42.670.632.453	22.849.360.962	19.821.271.491	86,75%

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp792.520,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp637.030.650.944,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp637.029.858.424,00. Terdapat defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp637.276.771.017,00. Sedangkan untuk Pos-Pos Luar Biasa bersaldo nihil, sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp637.276.771.017,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp17.351.852.200,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp637.276.771.017,00, dikurangi koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp684.750,00, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp649.593.096.656,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp29.667.493.089,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan

atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

URAIAN	CATATAN	31-Des-23		% thd Angg	31-Des-22
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		REALISASI (Rp)
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		243.841.124	-	1.802.322.673
JUMLAH PENDAPATAN			243.841.124	-	1.802.322.673
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	110.381.651.000	108.996.042.072	98,74%	108.957.180.694
Belanja Barang	B.2.2	397.546.980.000	393.801.489.489	99,06%	317.822.278.186
Belanja Modal	B.2.3	16.462.056.000	16.432.556.767	99,82%	7.909.384.162
JUMLAH BELANJA		524.390.687.000	519.230.088.328	99,02%	434.688.843.042

- Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp519.230.088.328,00 atau sebesar 99,02% dari total pagu anggaran setelah dikurangi pengembalian belanja.
- Sedangkan realisasi belanja per 31 Desember 2022 adalah Rp434.688.843.042,00 atau sebesar 99,06% dari pagu anggaran Rp438.832.116.000,00.

Jakarta, Mei 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

II. NERACA

NERACA PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	CATATAN	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	302.947.831	44.062.407
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3	-	71.841.633
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	10.431.410	8.358.819
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.5	(52.157)	(41.795)
Persediaan	C.1.6	603.889.690	482.933.148
JUMLAH ASET LANCAR		917.216.774	607.154.212
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	93.889.973.772	90.851.248.452
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.2	2.231.461.587	2.214.385.347
Aset Tetap Lainnya	C.2.3	146.140.500	547.639.287
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.4	(69.481.649.499)	(73.386.341.586)
JUMLAH ASET TETAP		26.785.926.360	20.226.931.500
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	11.090.945.832	9.282.906.227
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	7.842.606.562	-
Aset Lain-Lain	C.3.3	6.827.053.199	9.532.108.295
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	(10.793.116.274)	(16.799.739.272)
JUMLAH ASET LAINNYA		14.967.489.319	2.015.275.250
JUMLAH ASET		42.670.632.453	22.849.360.962
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	12.995.753.627	5.489.227.155
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.2	7.385.737	8.281.607
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		13.003.139.364	5.497.508.762
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5	29.667.493.089	17.351.852.200
JUMLAH EKUITAS		29.667.493.089	17.351.852.200
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		42.670.632.453	22.849.360.962

Jakarta, Mei 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

III. LAPORAN OPERASIONAL

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN	CATATAN	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNB	D.1	792.520	-
JUMLAH PENDAPATAN		792.520	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	109.295.553.146	108.618.302.334
Beban Persediaan	D.3	4.959.516.808	4.457.875.547
Beban Barang dan Jasa	D.4	333.704.220.483	212.343.338.230
Beban Pemeliharaan	D.5	8.135.106.582	13.128.995.299
Beban Perjalanan Dinas	D.6	170.987.306.946	107.732.136.167
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.7	-	1.220.362.973
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	9.948.936.617	9.730.779.673
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	10.362	(401.056)
Beban Lain-Lain			
JUMLAH BEBAN		637.030.650.944	457.231.389.167
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(637.029.858.424)	(457.231.389.167)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		(439.031.579)	1.457.074.326
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		192.118.986	211.074.852
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		(246.912.593)	1.668.149.178
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(637.276.771.017)	(455.563.239.989)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
SURPLUS/DEFISIT LO		(637.276.771.017)	(455.563.239.989)



Jakarta, Mei 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga Hartarto

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	CATATAN	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
EKUITAS AWAL	E.1	17.351.852.200	19.116.114.279	(1.764.262.079)	(9,23)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(637.276.771.017)	(455.563.239.989)	(181.713.531.028)	39,89
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(684.750)	(115.924.476)	115.239.726	(99,41)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		(4.578.750)	(115.924.476)	111.345.726	(96,05)
Koreksi Lain-Lain		3.894.000	-	3.894.000	100,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	649.593.096.656	453.914.902.386	195.678.194.270	43,11
KENAIKAN PENURUAN EKUITAS		12.315.640.889	(1.764.262.079)	14.079.902.968	(798,06)
EKUITAS AKHIR	E.8	29.667.493.089	17.351.852.200	12.315.640.889	70,98

Jakarta, Mei 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Airlangga Hartarto

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

Entitas

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

A.2. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Profil

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Oktober 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN). Seiring dengan pergantian Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah. Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

Pada tahun 2020 terdapat pergantian kabinet yang baru dan menyebabkan perubahan pada struktur kelembagaan pemerintah pusat. Proses penataan organisasi pun dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk

menyesuaikan rekomendasi restrukturisasi organisasi, berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatur peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;
- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

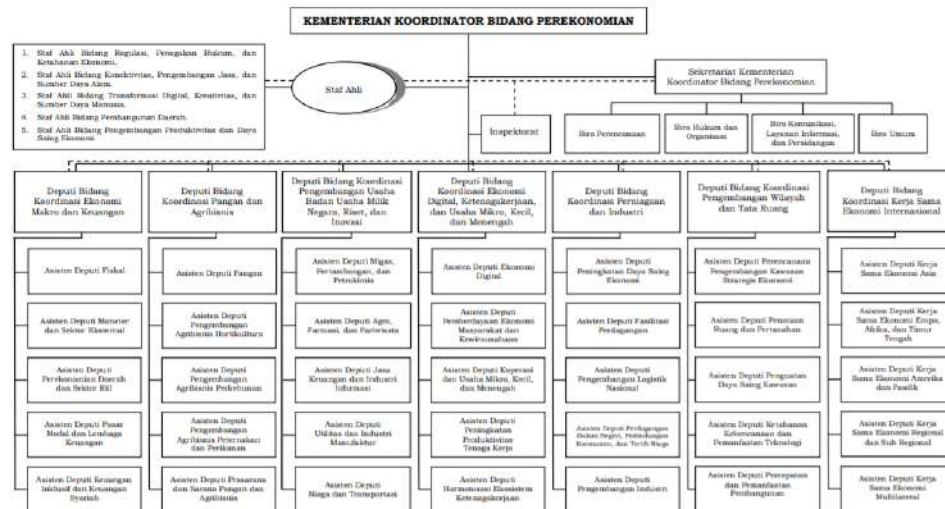
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pertanian; Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 sesuai hal tersebut di atas, maka diperlukan turunan peraturan dimaksud untuk mengatur kelembagaan internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini terwujud dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan tanggal 28 Oktober 2021. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur struktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- i. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi;
- j. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam;
- k. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia;
- l. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
- m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi; dan
- n. Inspektorat.

Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A.3. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2021-2024 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2021-2024 adalah ***“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***. Mengacu pada visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan visi Kementerian sebagai berikut.

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Pembangunan ekonomi dalam mewujudkan visi-misi Presiden diharapkan dapat diselenggarakan melalui perluasan kesempatan dan akses pada seluruh rakyat Indonesia dalam berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan serta peningkatan produktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan kesinambungan antar generasi. Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar

Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2021 - 2024.

Visi Presiden-Wakil Presiden 2021-2024 tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden-Wakil Presiden yang meliputi:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa**
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**
- 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga**
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan**

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan Misi Kementerian sebagai berikut:

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke 1, 2, 3, dan 4, sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Inisiatif dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian dalam rangka:

- 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;**
- 2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;**
- 3. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan**

4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dicapai melalui Misi/Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Koordinator Kementerian Teknis di bidang perekonomian dalam mewujudkan 4 (empat) sasaran pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan daya saing ekonomi.

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

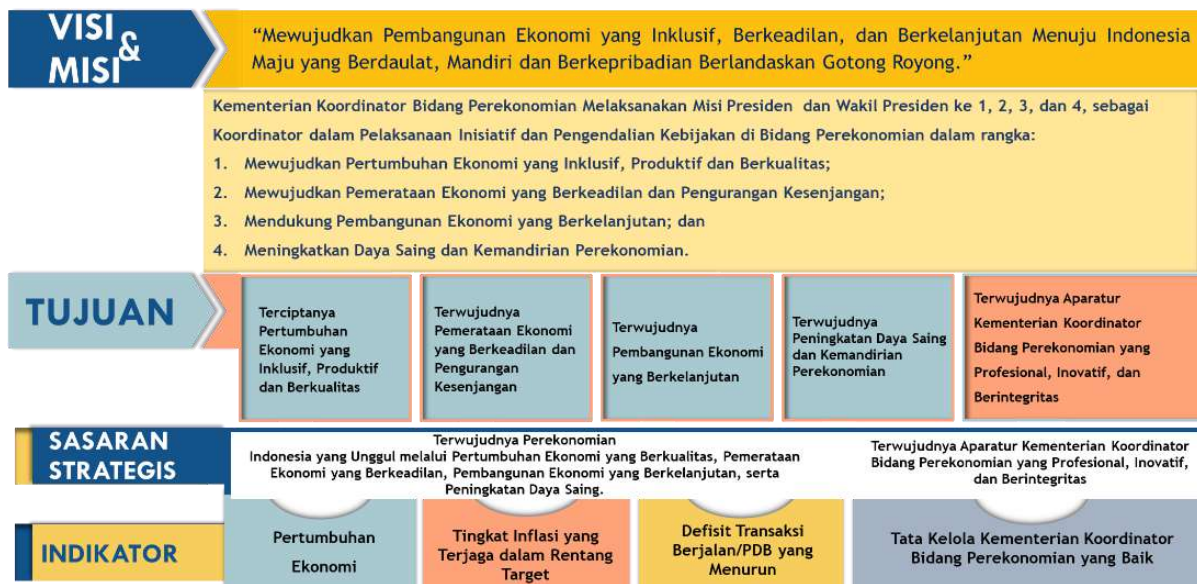
1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
4. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian;
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dari visi, misi, dan tujuan diatas terdapat kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diantaranya:

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan,	Pertumbuhan Ekonomi
2.	Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan		Tingkat Inflasi yang Terjaga dalam Rentang Target

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
3.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	serta Peningkatan Daya Saing.	Defisit Transaksi Berjalan/PDB yang Menurun
4.	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian		
5.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik



Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk tingkat pelaporan Eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Untuk periode pelaporan di tahun anggaran 2023, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua satuan kerja, yaitu Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit pelaporan tingkat Eselon I pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

A.5. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3) Belanja

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, Piutang diakui apabila

menenuhi kriteria sebagai berikut: Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO), apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah];
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

d. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

e. Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

f. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Kemenko Bidang Perekonomian memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp533.047.749.000,00. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Berikut ini adalah perubahan revisi terkait dengan pagu anggaran Kemenko Bidang Perekonomian:

Tabel 6
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2023

Uraian	2023	
	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	151.046.488.000	110.381.651.000
Belanja Barang	368.561.261.000	397.546.980.000
Belanja Modal	13.440.000.000	16.462.056.000
Jumlah Belanja	533.047.749.000	524.390.687.000

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp40.664.837.000,00, penambahan pagu belanja barang sebesar Rp28.985.719.000,00, dan penambahan belanja modal sebesar Rp3.022.056.000,00.

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp243.841.124

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp243.841.124,00, tidak terdapat estimasi pendapatan yang ditetapkan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2023. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	792.520	-
2	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	-	14.858.314	-
3	Pendapatan dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	-	221.400.291	-
4	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	6.789.999	-
Jumlah		-	243.841.124	-

Realisasi PNBP per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.558.481.549,00 atau turun sebesar 86,47% dibandingkan realisasi PNBP pada 31 Desember 2022. Perbandingan realisasi PNBP disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8
Perbandingan Rincian Realisasi PNBP
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31-Des	31-Des	Kenaikan (Penurunan)	
		TA 2023	TA 2022		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	6.789.999	1.457.074.326	(1.450.284.327)	(99,53%)
2	Pendapatan dan Penerimaan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	792.520	-	792.520	100,00%
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	14.858.314	25.989.852	(11.131.538)	(42,83%)
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	221.400.291	317.408.495	(96.008.204)	(30,25%)
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.850.000	(1.850.000)	(100,00%)
Jumlah		243.841.124	1.802.322.673	(1.558.481.549)	(86,47%)

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut

- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN merupakan penerimaan atas penjualan kendaraan bermotor sesuai Risalah Lelang Nomor: 718/25/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebesar Rp6.789.999,00. Informasi mengenai aset yang dilelang dapat dilihat di laporan pendukung pada Lampiran I;
- Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL atas kelebihan gaji pegawai tahun 2022 sebesar Rp14.858.314,00;
- Penerimaan kembali belanja barang TAYL terdiri atas setoran perjudian, PPNN, dan temuan BPK sebesar Rp221.400.291,00; dan
- Penerimaan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) merupakan setoran atas bunga dana hibah uang sebesar Rp792.520,00.

B.2.BELANJA NEGARA

*Realisasi Belanja
Negara
Rp519.230.088.328*

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp519.230.088.328,00 atau mencapai 99,02% dari alokasi anggaran sebesar Rp524.390.687.000,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi belanja dari transaksi kas, setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp959.254.934,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2023

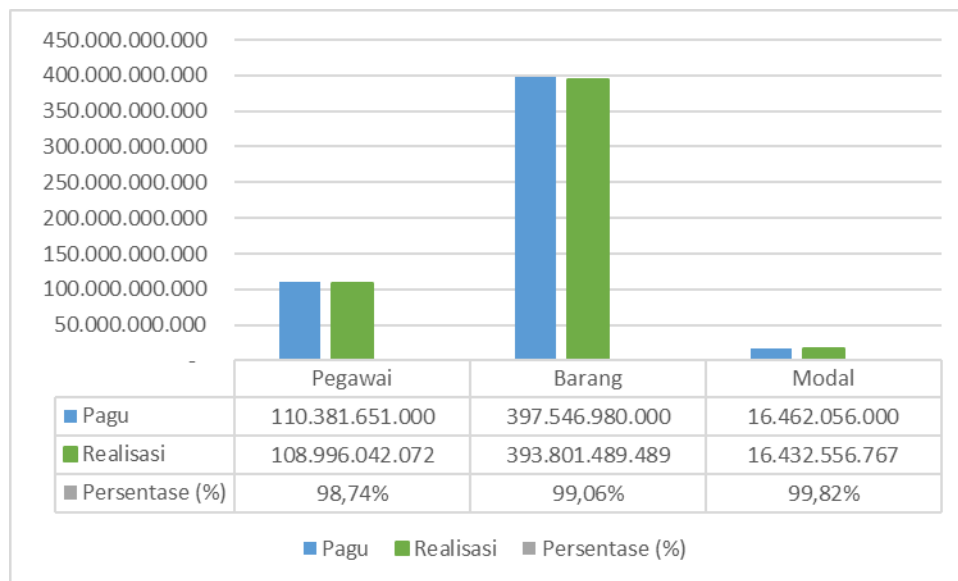
Kode Program	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	(%)	Pengembalian Belanja (Rp)
WA	Program Dukungan Manajemen	273.227.068.000	270.480.179.274	98,99%	240.749.692
CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	244.486.030.000	242.072.325.912	99,01%	718.505.242
CL	Hibah Langsung Luar Negeri	6.677.589.000	6.677.583.142	100,00%	-
Jumlah		524.390.687.000	519.230.088.328	99,02%	959.254.934

Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Desember 2023, seluruhnya bersumber dari dana Rupiah Murni sebesar Rp519.230.088.328,00. Berdasarkan jenis belanja, rincian anggaran dan persentase realisasi terhadap anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	110.381.651.000	108.996.042.072	1.385.608.928	98,74%
52	Belanja Barang	397.546.980.000	393.801.489.489	3.745.490.511	99,06%
53	Belanja Modal	16.462.056.000	16.432.556.767	29.499.233	99,82%
Jumlah Belanja		524.390.687.000	519.230.088.328	5.160.598.672	99,02%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Persentase realisasi atas jenis belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 31 Desember 2023 paling tinggi adalah belanja modal yakni 99,82% atau sebesar Rp16.432.556.767,00 dari pagu anggaran belanja modal sebesar Rp16.462.056.000,00. Adapun untuk belanja barang terealisasi senilai 99,06% atau sebesar Rp393.801.489.489,00, sedangkan belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi 98,74% atau sebesar Rp108.996.042.072,00. Perbandingan realisasi belanja pada periode 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja	
		31-Des TA 2023 (Rp)	31-Des TA 2022 (Rp)
51	Belanja Pegawai	108.996.042.072	108.957.180.694
52	Belanja Barang	393.801.489.489	317.822.278.186
52	Belanja Modal	16.432.556.767	7.909.384.162
Jumlah		519.230.088.328	434.688.843.042

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai
Rp108.996.042.07
2

Pada periode anggaran sampai dengan 31 Desember 2023, pagu Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar 98,74% atau sebesar Rp108.996.042.072,00 dari pagu sebesar Rp110.381.651.000,00. Nominal pagu dan realisasi terbesar pada Belanja Pegawai adalah akun belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito yang digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai, yang terealisasi sebesar 98,93% dari total pagu kelompok belanja dimaksud.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan capaian masing-masing sebesar Rp108.996.042.072,00 dan Rp108.957.180.694,00 atau naik sebesar 0,04%. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dikarenakan terdapat penambahan pegawai baru dan terisinya posisi jabatan pimpinan tinggi pada tahun 2023. Adapun Pengembalian Belanja Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp12.310.022,00 dan Rp95.330.773,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kelompok Belanja	Uraian	31-Des-23			Realisasi 31 Desember	Perbandingan Realisasi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tahun 2022 (Rp)	Naik (turun) (Rp)	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	28.707.261.000	28.389.979.340	98,89%	27.614.745.199	775.234.141	2,81%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	425.000	413.600	97,32%	422.648	(9.048)	(2,14%)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.679.982.000	1.662.179.110	98,94%	1.594.082.576	68.096.534	4,27%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	425.908.000	421.386.834	98,94%	411.728.976	9.657.858	2,35%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2.556.960.000	2.522.165.000	98,64%	4.176.260.000	(1.654.095.000)	(39,61%)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.481.700.000	2.456.494.000	98,98%	713.845.000	1.742.649.000	244,12%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	253.406.000	245.806.566	97,00%	228.818.833	16.987.733	7,42%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.406.930.000	1.390.753.680	98,85%	1.368.448.350	22.305.330	1,63%
511129	Belanja Uang Makan PNS	3.912.584.000	3.707.888.000	94,77%	4.309.273.000	(601.385.000)	(13,96%)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	868.770.000	858.900.000	98,86%	882.580.000	(23.680.000)	(2,68%)
511152	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	294.250.000	284.375.000	96,64%	306.250.000	(21.875.000)	(7,14%)
512211	Belanja Uang Lembur	186.257.000	184.836.000	99,24%	102.798.000	82.038.000	79,81%
512411	Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	67.607.218.000	66.883.174.964	98,93%	67.343.258.885	(460.083.921)	(0,68%)
Pengembalian Belanja Pegawai		-	(12.310.022)	-	(95.330.773)	83.020.751	(87,09%)
Jumlah Kelompok Belanja Pegawai		110.381.651.000	108.996.042.072	98,74%	108.957.180.694	38.861.378	0,04%

B.2.2. BELANJA BARANG

*Realisasi Belanja
Barang
Rp393.801.489.489*

Pada periode 31 Desember 2023, pagu Belanja Barang telah terealisasi sebesar 99,06% atau sebesar Rp393.801.489.489,00 dari pagu sebesar Rp397.546.980.000,00.

Persentase realisasi terbesar pada Belanja Barang terdapat pada akun Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel sebesar Rp87.880.750,00 atau 100% dari pagu sebesar Rp87.881.000,00. Persentase realisasi terbesar kedua Belanja Barang merupakan akun Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid -

19 yang terealisasi sebesar 100% atau sebesar Rp5.924.000,00 dari pagu sebesar Rp5.924.000,00.

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023 jika dibandingkan 31 Desember 2022, dengan capaian realisasi masing-masing adalah sebesar Rp393.801.489.489,00 dan Rp317.822.278.186,00. Persentase penurunan realisasi yang terbesar adalah Belanja Jasa Pos dan Giro yakni 100% atau sebesar Rp2.505.800,00. Persentase penurunan realisasi yang terbesar kedua adalah Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid – 19 yakni 98,85% atau sebesar Rp976.043.985,00.

Adapun Pengembalian Belanja Barang pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp946.944.912,00 dan Rp116.336.798,00. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kode Akun	Uraian	31-Des-23			Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Perbandingan Realisasi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Naik (turun) (Rp)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6.054.712.000	6.048.922.246	99,90%	6.132.900.704	(83.978.458)	(1,37%)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16.529.000	15.783.000	95,49%	22.974.125	(7.191.125)	(31,30%)
521115	Belanja Honor Operasional Satker	1.625.008.000	1.621.850.000	99,81%	1.508.084.000	113.766.000	7,54%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.033.266.000	3.032.754.632	99,98%	2.597.546.169	435.208.463	16,75%
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	522.211.000	521.686.877	99,90%	2.972.464.088	(2.450.777.211)	(82,45%)
521211	Belanja Bahan	15.961.660.000	15.619.435.539	97,86%	9.263.271.396	6.356.164.143	68,62%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6.981.733.000	6.967.685.000	99,80%	5.630.130.000	1.337.555.000	23,76%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.070.880.000	1.069.826.287	99,90%	1.228.040.284	(158.213.997)	(12,88%)
521241	Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19	11.400.000	11.379.720	99,82%	987.423.705	(976.043.985)	(98,85%)
521252	Belanja Peralatan dan Mesin- Ekstrakomptabel	87.881.000	87.880.750	100,00%	4.456.650	83.424.100	1871,90%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.983.139.000	4.974.595.830	99,83%	4.027.692.797	946.903.033	23,51%
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	557.225.000	555.472.885	99,69%	464.682.439	90.790.446	19,54%
521841	Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19	41.100.000	41.011.000	99,78%	297.645.100	(256.634.100)	(86,22%)
522111	Belanja Langganan Listrik	4.677.658.000	4.677.080.489	99,99%	3.975.704.760	701.375.729	17,64%
522112	Belanja Langganan Telepon	58.541.000	57.801.017	98,74%	79.801.345	(22.000.328)	(27,57%)
522113	Belanja Langganan Air	18.000.000	17.608.385	97,82%	-	17.608.385	100,00%
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.939.386.000	6.907.665.543	99,54%	6.938.709.414	(31.043.871)	(0,45%)
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	-	-	0,00%	2.505.800	(2.505.800)	(100,00%)
522131	Belanja Jasa Konsultan	14.393.220.000	14.335.906.468	99,60%	10.231.895.121	4.104.011.347	40,11%
522141	Belanja Sewa	64.465.566.000	64.450.248.209	99,98%	56.906.755.496	7.543.492.713	13,26%
522151	Belanja Jasa Profesi	4.673.980.000	4.582.469.325	98,04%	4.278.960.750	303.508.575	7,09%
522191	Belanja Jasa Lainnya	79.338.715.000	79.151.882.361	99,76%	79.522.974.745	(371.092.384)	(0,47%)
522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	5.924.000	5.924.000	100,00%	173.183.670	(167.259.670)	(96,58%)
523111	Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan	4.166.760.000	4.132.991.239	99,19%	9.124.854.040	(4.991.862.801)	(54,71%)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.608.103.000	3.563.829.890	98,77%	3.901.435.477	(337.605.587)	(8,65%)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	29.804.000.000	29.624.360.440	99,40%	26.655.420.225	2.968.940.215	11,14%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.142.720.000	1.098.650.500	96,14%	491.306.980	607.343.520	123,62%
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.163.033.000	30.854.740.188	99,01%	17.770.874.712	13.083.865.476	73,63%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	66.077.026.000	65.178.712.910	98,64%	41.570.708.282	23.608.004.628	56,79%
524211	Belanja Perjalanan Biasa- Luar Negeri	11.217.036.000	11.141.131.830	99,32%	7.642.389.790	3.498.742.040	45,78%
524219	Belanja Perjalanan Lainnya- Luar Negeri	34.850.568.000	34.399.147.841	98,70%	13.533.822.920	20.865.324.921	154,17%
Pengembalian Belanja Barang			(946.944.912)		(116.336.798)	(830.608.114)	713,97%
Jumlah Kelompok Belanja Barang		397.546.980.000	393.801.489.489	99,06%	317.822.278.186	75.979.211.303	23,91%

Kemenko Bidang Perekonomian mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp580.635.000,00. Anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp580.001.597,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp4.430.716.563,00. Penurunan tersebut dikarenakan adanya larangan penggunaan akun covid sesuai dengan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023. Rincian belanja barang penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja barang untuk Penanganan Pandemi Covid 19
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian Akun	Realisasi 31 Desember 2023			Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Perbandingan Realisasi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Naik (Turun) (Rp)	%
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	522.211.000	521.686.877	99,90%	2.972.464.088	(2.450.777.211,00)	(82,45%)
	Pengadaan masker/hand sanitizer						
521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	11.400.000	11.379.720	99,82%	987.423.705	(976.043.985,00)	(98,85%)
	Pengadaan APD, Saniter, Hand Gloves, dan Masker Medis.						
521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi Covid 19	41.100.000	41.011.000	99,78%	297.645.100	(256.634.100,00)	(86,22%)
	Pengadaan Masker dan Hand Sanitizer sebagai Persediaan						
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19	5.924.000	5.924.000	100,00%	173.183.670	(167.259.670,00)	(96,58%)
	Penyemprotan desinfektan dan pemeriksaan swab antigen Covid						
Jumlah Belanja		580.635.000	580.001.597	99,89%	4.430.716.563	(3.850.714.966,00)	(86,91%)

B.2.3. BELANJA MODAL

*Realisasi Belanja
Modal
Rp16.432.556.767*

Pada periode 31 Desember 2023, pagu Belanja Modal telah terealisasi sebesar 99,82% atau sebesar Rp16.432.556.767,00 dari pagu sebesar Rp16.462.056.000,00. Nominal pagu terbesar pada Belanja Modal terdapat pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.750.979.000,00, kemudian diikuti Belanja Modal Lainnya sebesar Rp694.000.000,00 yang digunakan untuk perolehan Aset Tak Berwujud dalam bentuk perangkat lunak komputer (*software*) serta diikuti Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp17.077.000,00. Capaian nominal terbesar realisasi Belanja Modal terdapat pada kelompok Belanja Peralatan Mesin, yang terealisasi sebesar Rp15.744.576.682,00 atau 99,96%. Sedangkan untuk Belanja Modal Lainnya terealisasi sebesar Rp670.903.845,00 atau 96,67%. Untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan terealisasi sebesar Rp17.076.240,00 atau 100%.

Perbandingan realisasi belanja modal pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022, masing-masing sebesar

Rp16.432.556.767,00 dan Rp7.909.384.162,00. Rincian belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kelompok Belanja	Uraian	Realisasi 31 Desember 2023			Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Perbandingan Realisasi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Naik (turun) (Rp)	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.750.979.000	15.744.576.682	99,96%	7.617.368.862	8.127.207.820	106,69%
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.077.000	17.076.240	100,00%	122.100.000	(105.023.760)	(86,01%)
5361	Belanja Modal Lainnya	694.000.000	670.903.845	96,67%	169.915.300	500.988.545	294,85%
Pengembalian Belanja Modal		-	-		-		
Jumlah Belanja Modal		16.462.056.000	16.432.556.767	99,82%	7.909.384.162	8.523.172.605	107,76%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1.ASET LANCAR

Aset Lancar

Rp917.216.774

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp917.216.774,00 dan Rp607.154.212,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	302.947.831	44.062.407
3	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	71.841.633
4	Uang Muka Belanja (prepayment)	-	-
5	Piutang Bukan Pajak	10.431.410	8.358.819
6	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	(52.157)	(41.795)
7	Persediaan	603.889.690	482.933.148
Jumlah		917.216.774	607.154.212

C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 bersaldo sebesar Rp0, adapun saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) per 31 Desember 2023 yang belum dipertanggungjawabkan

atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian atas Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada Lampiran II.

C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp302.947.831*

Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 bersaldo Rp302.947.831,00 dan Rp44.062.407,00. Kas lainnya setara kas per 31 Desember 2023 merupakan kas yang berada di penguasaan bendahara yang bukan berasal dari UP/TUP. Rincian saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan uang pengembalian belanja lewat tahun sebesar Rp295.562.094,00;
- b. Penerimaan uang potongan pajak yang belum disetor sebesar Rp7.385.737,00.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing satker dapat dilihat pada Lampiran III.

C.1.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

*Belanja Dibayar
Dimuka Rp0*

Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp71.841.633,00. Saldo per 31 Desember 2023 merupakan manfaat yang sisa manfaatnya melampaui tanggal pelaporan.

C.1.4. PIUTANG BUKAN PAJAK

*Piutang Bukan
Pajak Rp10.431.410*

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.431.410,00 dan Rp8.358.819,00 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 merupakan piutang atas potongan absen honorarium PPNPN. Rincian Piutang Bukan Pajak dan perhitungan penyisihannya disajikan pada Lampiran IV.

C.1.5. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG BUKAN PAJAK

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih
Piutang Bukan
Pajak Rp(52.157)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp52.157,00 dan minus Rp41.795,00. Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digolongkan dalam piutang dengan kualitas lancar. Dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek sesuai dengan yang diatur di PMK Nomor 69/PMK/06/2014 menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

C.1.6. PERSEDIAAN

Persediaan

Rp603.889.690

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp603.889.690,00 dan Rp482.933.148,00. Persediaan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31-Des-23			31-Des-22		
		Satuan Kerja		Jumlah	Satuan Kerja		Jumlah
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Barang Konsumsi	172.022.934	219.213.865	391.236.799	159.937.296	85.000.100	244.937.396
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	39.572.080	30.113.033	69.685.113	35.151.700	45.568.920	80.720.620
3	Persediaan Lainnya	142.967.778	-	142.967.778	157.275.132	-	157.275.132
Jumlah		354.562.792	249.326.898	603.889.690	352.364.128	130.569.020	482.933.148

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 berdasarkan metode FIFO.

C.2.ASET TETAP

Aset Tetap

Rp26.785.926.360

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp26.785.926.360,00 dan Rp20.226.931.500,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Aset Tetap
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31-Des-23			31-Des-22		
		Satuan Kerja		Jumlah	Satuan Kerja		Jumlah
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Peralatan dan Mesin	85.916.013.348	7.973.960.424	93.889.973.772	89.057.649.188	1.793.599.264	90.851.248.452
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.231.461.587	-	2.231.461.587	2.214.385.347	-	2.214.385.347
3	Aset Tetap Lainnya	146.140.500	-	146.140.500	547.639.287	-	547.639.287
Total Nilai Perolehan		88.293.615.435	7.973.960.424	96.267.575.859	91.819.673.822	1.793.599.264	93.613.273.086
Akumulasi Penyusutan		- 67.242.077.781	- 2.239.571.718	- 69.481.649.499	- 72.027.965.098	- 1.358.376.488	- 73.386.341.586
Jumlah		21.051.537.654	5.734.388.706	26.785.926.360	19.791.708.724	435.222.776	20.226.931.500

C.2.1. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan Mesin
Rp93.889.973.772

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp93.889.973.772,00 dan Rp90.851.248.452,00. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin terdiri pembelian sebesar Rp15.744.576.682,00, transfer masuk sebesar Rp894.515.155,00, aset dari belanja pemeliharaan sebesar Rp56.801.787,00, reklas masuk sebesar Rp1.065.862.735,00, penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp39.987.400,00, dan jurnal koreksi atas pengembangan aset dari belanja pemeliharaan sebesar Rp4.995.000,00. Terdapat mutasi kurang berupa reklas keluar sebesar Rp1.065.862.735,00 dikarenakan adanya kesalahan kodefikasi barang dan Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp13.702.150.704,00. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin

Uraian Transaksi	Saldo (Rp)	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		90.851.248.452
Mutasi Tambah		
Pembelian	15.744.576.682	
Transfer Masuk	894.515.155	
Aset dari belanja pemeliharaan	56.801.787	
Reklas Masuk Kodefikasi Barang	1.065.862.735	
Penggunaan Kembali	39.987.400	
Pengembangan Nilai Aset	4.995.000	
Total Mutasi Tambah	17.806.738.759	
Mutasi Kurang		
Reklas Keluar Kodefikasi Barang	1.065.862.735	
Penghentian Penggunaan	13.702.150.704	
Total Mutasi Kurang	14.768.013.439	
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		93.889.973.772
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2023		68.456.737.332
Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023		25.433.236.440

Transaksi penambahan dan pengurangan pada Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 20
Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	Jumlah (Unit)	Rupiah Aset (Rp)
301	Alat Bantu	5	1.054.024.912
302	Alat Angkutan Darat	6	967.771.155
303	Alat Ukur	13	31.424.940
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	1.725	7.184.569.342
306	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	544	1.788.051.121
307	Alat Kedokteran	5	176.300.000
308	Alat Laboratorium	3	12.377.000
309	Alat Khusus Kepolisian	3	93.547.580
310	Alat Komputer	332	3.459.947.389
Total		2.636	14.768.013.439

Tabel 21
Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin

Kelompok BMN	Mutasi Peralatan dan Mesin	Kuantitas	Nilai (Rp)
A. Saldo Transaksi Pembelian dan Transfer Masuk			
301	Alat Bantu	5	5.221.082.249
302	Alat Angkutan	6	1.900.630.310
303	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	-
305	Alat Kantor & Rumah Tangga	523	3.508.608.250
306	Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	136	3.981.139.100
307	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	22.300.000
308	Alat Laboratorium	1	7.900.000
309	Alat Khusus Kepolisian	3	93.547.580
310	Komputer	178	2.928.790.070
319	Peralatan Olahraga	9	142.741.200
Total Saldo Pembelian dan Transfer Masuk		862	17.806.738.759
B. Transaksi Pengembangan Nilai Aset			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
	Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset		-
C. Transaksi Pengembangan Melalui KDP			
301	Alat Besar		-
310	Komputer		-
	Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset		-
Mutasi Peralatan dan Mesin s.d 31 Desember 2023		862	17.806.738.759

Keterangan:

- 1) Belum dilakukan reklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp856.867.350,00 yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan operasional. Pada bulan Desember 2023, Satker Setdenas KEK sudah selesai dalam melakukan inventarisasi dan mulai mengelompokkan barang yang sudah tidak

digunakan ke dalam 3 ruangan yaitu Ruang Barang Rusak Berat, Gudang I, dan Gudang II. Satker Setdenas KEK mulai menyusun administrasi penghapusan BMN yang sudah tidak digunakan pada Tahun Anggaran 2024, dan akan segera mengajukan penghapusan atas BMN Rusak Berat tersebut sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- 2) CCTV sebanyak 30 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp120.555.864,00 dan nilai buku sebesar Rp1.560.000,00 sudah tidak digunakan lagi untuk mendukung kegiatan operasional namun masih tercatat sebagai peralatan dan mesin, belum dilakukan reklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain;
- 3) CCTV sebanyak 35 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp157.975.439,00 dan nilai buku sebesar Rp5.676.000,00 masih tercatat sebagai peralatan dan mesin namun tidak dapat diketahui lokasi/keberadaannya.

C.2.2. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.231.461.587,00 dan Rp2.214.385.347,00. Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu berupa Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil. Terdapat mutasi tambah berupa pengembangan nilai aset sebesar Rp17.076.240,00.

Tabel 22
Rincian Mutasi Saldo Jaringan, Irigasi dan Jaringan

Uraian Transaksi	Saldo (Rp)	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022:		
Satker 427752	2.214.385.347	
Satker 427755	-	
Total Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		2.214.385.347
Mutasi Tambah Satker 427752:		
Pengembangan Nilai Aset	17.076.240	
Mutasi Tambah Satker 427755:		
Pengembangan Nilai Aset	-	
Total Mutasi Tambah	17.076.240	
Mutasi Kurang Satker 427752:		
Penghentian Penggunaan	-	
Mutasi Kurang Satker 427755:		
Penghentian Penggunaan	-	
Total Mutasi Kurang	-	
Total Nilai Tambah/Kurang per 31 Desember 2023		17.076.240
Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023		2.231.461.587
Satker 427752		2.231.461.587
Satker 427755		-

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp2.231.461.587*

C.2.3. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap lainnya
Rp146.140.500

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp146.140.500,00 dan Rp547.639.287,00. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara fisik berupa wayang, lukisan dan artwork.

C.2.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp69.481.649.499

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp69.481.649.499,00 dan Rp73.386.341.586,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 23
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	93.889.973.772	68.456.737.332	25.433.236.440
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.231.461.587	1.024.912.167	1.206.549.420
3	Aset Tetap Lainnya	146.140.500		146.140.500
Jumlah		96.267.575.859	69.481.649.499	26.785.926.360

C.3.ASET LAINNYA

Aset Lainnya
Rp14.967.489.319

Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.967.489.319,00 dan Rp2.015.275.250,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Tabel 24
Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31-Des-23			31-Des-22		
		Satuan Kerja		Jumlah (Rp)	Satuan Kerja		Jumlah (Rp)
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Aset Tak Berwujud	10.378.741.987	712.203.845	11.090.945.832	9.202.606.227	80.300.000	9.282.906.227
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	7.842.606.562	-	7.842.606.562	-	-	-
3	Aset Lain-lain	6.808.133.199	18.920.000	6.827.053.199	8.640.063.295	892.045.000	9.532.108.295
Total Nilai Perolehan		25.029.481.748	731.123.845	25.760.605.593	17.842.669.522	972.345.000	18.815.014.522
Akumulasi Penyusutan		- 10.670.908.774	- 122.207.500	- 10.793.116.274	- 15.827.394.272	- 972.345.000	- 16.799.739.272
Jumlah		14.358.572.974	608.916.345	14.967.489.319	2.015.275.250	-	2.015.275.250

C.3.1. ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud
Rp11.090.945.832

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.090.945.832,00 dan Rp9.282.906.227,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa *Software*, Lisensi, Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Transaksi Aset tak Berwujud per 31 Desember 2023

Jenis Transaksi Aset Tak Berwujud	Nilai (Rp)
Saldo Awal	9.282.906.227
- <i>Software</i>	9.177.718.727
- Lisensi	105.187.500
- Hasil Kajian/Penelitian	-
- Aset Tak Berwujud Lainnya	-
Mutasi Tambah	
- Pembelian <i>Software</i> Komputer	39.000.000
- Pembelian Aset Tak Berwujud Lainnya	631.903.845
- Jurnal Koreksi BPK (<i>Software</i>)	183.900.000
- Jurnal Koreksi BPK (Hasil Kajian/Penelitian)	5.318.010.000
- Jurnal Koreksi BPK (Aset Tak Berwujud Lainnya)	440.498.787
Mutasi Kurang	
- Penghentian <i>Software</i> Komputer	4.477.185.527
- Penghentian Lisensi	105.187.500
- Jurnal Koreksi BPK (<i>Software</i>)	39.000.000
- Jurnal Koreksi BPK (Aset Tak Berwujud Lainnya)	183.900.000
Saldo ATB Per 31 Desember 2023	11.090.945.832
- <i>Software</i>	4.884.433.200
- Lisensi	-
- Hasil Kajian/Penelitian	5.318.010.000
- Aset Tak Berwujud Lainnya	888.502.632

C.3.2. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp7.842.606.562

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.842.606.562,00 dan Rp0. Saldo tersebut merupakan saldo transaksi RPATA pada rekening penampungan yang akan dilakukan pembayaran pada TA 2024 setelah pekerjaan TA 2023 telah selesai dilaksanakan.

C.3.3. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain
Rp6.827.053.199

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.827.053.199,00 dan Rp9.532.108.295,00. Aset lain-lain merupakan Barang Milik

rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas, atau dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, terdiri atas:

Tabel 26
Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.205.008.172	1.174.304.780
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5.622.045.027	8.357.803.515
Jumlah		6.827.053.199	9.532.108.295

Mutasi atas saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Mutasi Aset Lain-Lain

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai perolehan per 31 Desember 2022	9.532.108.295
Mutasi Tambah	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	13.702.150.704
Penghentian Aset Dari Penggunaan Lisensi	105.187.500
Penghentian Aset Dari Penggunaan <i>Software</i> Komputer	4.477.185.527
Mutasi Kurang	
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	13.631.459.912
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	39.987.400
Penghapusan Lisensi (SK No 7 Tahun 2023)	998.900.000
Penghapusan <i>Software</i> Komputer (SK No 7 dan No 11 TA 2023)	6.319.231.515
Saldo Akhir 31 Desember 2023	6.827.053.199

C.3.4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar minus Rp10.793.116.274,00 dan Rp16.799.739.272,00.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Lain-lain
Rp(10.793.116.274)*

Tabel 28
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	4.884.433.200	4.329.155.575	555.277.625
2	Lisensi	-	-	-
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	888.502.632	-	888.502.632
4	Hasil Kajian/Penelitian	5.318.010.000	-	5.318.010.000
Jumlah A. Aset Tak Berwujud		11.090.945.832	4.329.155.575	6.761.790.257
B	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan			
1	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		-	-	-
C	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.205.008.172	1.205.008.172	-
2	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5.622.045.027	5.258.952.527	363.092.500
Jumlah B. Aset Lainnya		6.827.053.199	6.463.960.699	363.092.500
D	Aset Lainnya Yang Belum Diregister			
1	Aset Lainnya Yang Belum Diregister	-	-	-
Aset Lainnya Yang Belum Diregister		-	-	-
Total		17.917.999.031	10.793.116.274	7.124.882.757

C.4.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp13.003.139.364

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.003.139.364,00 dan Rp5.497.508.762,00 yang merupakan kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Tabel 29
Rincian Utang Jangka Pendek
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31-Des-23			31-Des-22		
		Satuan Kerja		Jumlah	Satuan Kerja		Jumlah
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	12.703.623.912	292.129.715	12.995.753.627	5.368.138.276	121.088.879	5.489.227.155
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.385.737	-	7.385.737	8.281.607	-	8.281.607
Jumlah		12.711.009.649	292.129.715	13.003.139.364	5.376.419.883	121.088.879	5.497.508.762

C.4.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang Kepada Pihak
ketiga
Rp12.995.753.627

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp12.995.753.627,00 dan Rp5.489.227.155,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 30
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023

Uraian Akun	31-Des-23			Keterangan
	Satuan Kerja		Jumlah	
	427752 (Rp)	427755 (Rp)		
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	4.596.619.653	287.418.710	4.884.038.363	Pembayaran Tunjangan Kinerja Periode Desember 2023 yang dibayarkan di Januari 2024
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	290.163.572	4.711.005	294.874.577	Pembayaran Tagihan Listrik dan Telepon Periode Desember 2023 yang dibayarkan di Januari 2024
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	7.816.840.687	-	7.816.840.687	Saldo di Rekening Penampungan atas transaksi RPATA yang pembayarannya dilakukan di TA 2024
Total	12.703.623.912	292.129.715	12.995.753.627	-

Rincian atas Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada Lampiran V.

C.4.2. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp7.385.737*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 bersaldo Rp7.385.737,00 dan Rp8.281.607,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada per tanggal 31 Desember 2023 merupakan saldo kas yang berasal dari pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

Tabel 31
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	31-Des-23			31-Des-22		
		Satuan Kerja		Jumlah	Satuan Kerja		Jumlah
		427752 (Rp)	427755 (Rp)		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	7.385.737	-	7.385.737	8.281.607	-	8.281.607
	Jumlah	7.385.737	-	7.385.737	8.281.607	-	8.281.607

Rincian atas Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada Lampiran VI.

C.5.EKUITAS

*Ekuitas
Rp29.667.493.089*

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.667.493.089,00 dan Rp17.351.852.200,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan

Penerimaan Negara

Bukan Pajak

Rp792.520

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp792.520,00.

Tabel 32
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	Naik/Turun (%)
Pendapatan PNPB Lainnya				
- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	792.520	-	792.520	100%
Jumlah	792.520	-	792.520	100%

D.2. BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai

Rp109.295.553.146

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp109.295.553.146,00 dan Rp108.618.302.334,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah Beban Pegawai mengalami kenaikan dibandingkan 31 Desember 2022 dikarenakan adanya penerimaan pegawai baru dan terisinya posisi jabatan pimpinan tinggi pada tahun 2023. Rincian Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	28.384.646.225	27.564.118.658	820.527.567	2,98%
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	413.512	407.188	6.324	1,55%
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.662.179.110	1.594.082.576	68.096.534	4,27%
511122	Beban Tunj. Anak PNS	421.386.834	411.728.976	9.657.858	2,35%
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2.522.165.000	4.175.720.000	(1.653.555.000)	-39,60%
511124	Beban Fungsional PNS	2.455.392.507	710.994.950	1.744.397.557	245,35%
511125	Beban Tunj. PPh PNS	245.806.566	228.818.833	16.987.733	7,42%
511126	Beban Tunj. Beras PNS	1.390.753.680	1.368.448.350	22.305.330	1,63%
511129	Beban Uang Makan PNS	3.707.888.000	4.309.273.000	(601.385.000)	-13,96%
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	849.519.374	881.840.000	(32.320.626)	-3,67%
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	284.375.000	306.250.000	(21.875.000)	-7,14%
512211	Beban Uang Lembur	184.836.000	102.798.000	82.038.000	79,81%
512411	Beban Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan)	67.186.191.338	66.963.821.803	222.369.535	0,33%
<i>Pengembalian Beban Pegawai</i>		-	-	-	-
Jumlah		109.295.553.146	108.618.302.334	677.250.812	0,62%

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan
Rp4.959.516.808

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.959.516.808,00 dan Rp4.457.875.547,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik / (Turun) (Rp)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	4.378.794.744	3.660.940.960	717.853.784
593131	Beban Persediaan bahan baku	-	1.665.000	(1.665.000)
593149	Beban Persediaan Lainnya	580.722.064	795.269.587	(214.547.523)
Jumlah Beban Persediaan		4.959.516.808	4.457.875.547	501.641.261

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa
Rp333.704.220.483

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp333.704.220.483,00 dan Rp212.343.338.230,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Kenaikan beban barang dan jasa pada TA 2023 dikarenakan adanya pengesahan hibah langsung. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
521111	Beban Keperluan Perkantoran	6.034.962.514	6.112.852.985	(77.890.471)	(1,27%)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.783.000	22.974.125	(7.191.125)	(31,30%)
521115	Beban Honor Operasional Satker	1.613.038.000	1.508.084.000	104.954.000	6,96%
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3.053.584.632	2.597.546.169	456.038.463	17,56%
521131	Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid	521.686.877	2.972.464.088	(2.450.777.211)	(82,45%)
521211	Beban Bahan	15.526.843.889	9.357.314.046	6.169.529.843	65,93%
521213	Beban Honor Output Kegiatan	6.897.649.868	5.599.210.000	1.298.439.868	23,19%
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.069.826.287	1.228.040.284	(158.213.997)	(12,88%)
521241	Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi	11.379.720	987.423.705	(976.043.985)	(98,85%)
522111	Beban Langganan Listrik	4.667.311.260	4.053.763.367	613.547.893	15,14%
522112	Beban Langganan Telepon	57.815.321	78.263.252	(20.447.931)	(26,13%)
522113	Beban Langganan Air	17.608.385	-	17.608.385	100,00%
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.947.577.176	6.969.078.411	(21.501.235)	(0,31%)
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	-	2.505.800	(2.505.800)	(100,00%)
522131	Beban Jasa Konsultan	9.017.896.468	10.231.895.121	(1.213.998.653)	(11,86%)
522141	Beban Sewa	64.422.492.595	56.902.221.848	7.520.270.747	13,22%
522151	Beban Jasa Profesi	4.564.299.325	4.293.960.750	270.338.575	6,30%
522191	Beban Jasa Lainnya	209.170.660.416	99.241.574.959	109.929.085.457	110,77%
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel	1.100.000	6.525.000	(5.425.000)	(83,14%)
522192	Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19	5.924.000	173.183.670	(167.259.670)	(96,58%)
521252	Beban Peralatan dan Mesin- Ekstrakomtabel	86.780.750	4.456.650	82.324.100	1847,22%
<i>Pengembalian Beban Barang & Jasa</i>		-	-	-	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa		333.704.220.483	212.343.338.230	121.360.882.253	57,15%

Beban barang dan jasa khusus penanganan pandemi Covid-19 sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp538.990.597,00 yang terdiri dari Beban Barang

Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp521.686.877,00, Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp11.379.720,00 dan Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp5.924.000,00. Rincian beban barang dan jasa khusus penanganan pandemi Covid-19 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Barang Jasa Penanganan Pandemi

No	Beban	Jumlah (Rp)
1	Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	521.686.877
	pengadaan masker/hand sanitizer	
2	Beban barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid 19	11.379.720
	Pengadaan APD, Saniter, Hand Gloves, dan Masker Medis.	
3	Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid 19	5.924.000
	Penyemprotan desinfektan dan pemeriksaan swab antigen Covid	
Jumlah		538.990.597

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.135.106.582,00 dan Rp13.128.995.299,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.099.889.644	8.982.178.970	(4.882.289.326)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.544.610.573	3.825.505.927	(280.895.354)
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	490.606.365	321.310.402	169.295.963
Jumlah		8.135.106.582	13.128.995.299	(4.993.888.717)

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp170.987.306.946,00 dan Rp107.732.136.167,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian beban perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan
Rp8.135.106.582

Beban Perjalanan Dinas
Rp170.987.306.946

Tabel 38
Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
524111	Beban Perjalanan Biasa	29.607.997.551	26.635.960.799	2.972.036.752	11,16%
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.098.350.500	491.306.980	607.043.520	123,56%
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.666.404.188	17.952.539.712	12.713.864.476	70,82%
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	64.543.170.140	41.514.338.987	23.028.831.153	55,47%
524211	Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	11.141.131.830	7.608.903.990	3.532.227.840	46,42%
524219	Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	33.930.252.737	13.529.085.699	20.401.167.038	150,79%
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		170.987.306.946	107.732.136.167	63.255.170.779	58,72%

D.7. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

*Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat Rp0*

Jumlah beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.220.362.973,00. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2022 merupakan beban atas penyerahan alat penunjang pendidikan berupa peralatan mesin yang berasal dari Hibah TVET System Reform.

D.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp9.948.936.617*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.948.936.617,00 dan Rp9.730.779.673,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.961.627.914	8.544.717.039	416.910.875	4,88%
Beban Penyusutan Jaringan	56.118.578	55.359.634	758.944	1,37%
Beban Amortisasi Software	737.767.375	886.200.250	(148.432.875)	(16,75%)
Beban Amortisasi Lisensi	5.259.375	10.518.750	(5.259.375)	(50,00%)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan	176.486.875	222.307.500	(45.820.625)	(20,61%)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	11.676.500	11.676.500	-	0,00%
Beban Penyusutan aset tetap lainnya	-	-	-	0,00%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.948.936.617	9.730.779.673	218.156.944	2,24%

D.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.362,00 dan minus Rp401.056,00. Saldo atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terjadi atas penyesuaian atas saldo pada akun penyisihan piutang tak tertagih periode berjalan dengan periode sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang- TP/TGR	-	-	-	100,00%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	10.362	(401.056)	411.418	(102,58%)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	10.362	(401.056)	411.418	(102,58%)

D.10. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2023 sebesar (Rp246.912.593,00), dengan rincian sebagai berikut:

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp10.362*

*Kegiatan Non
Operasional
(Rp246.912.593)*

Tabel 41
Rincian Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	%
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional				
- Surplus (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	(439.031.579)	1.457.074.326	(1.896.105.905)	(130,13%)
# Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6.789.999	1.457.074.326	(1.450.284.327)	(99,53%)
# Beban Pelepasan Aset Non Lancar	445.821.578	-	445.821.578	100,00%
- Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	192.118.986	211.074.852	(18.955.866)	(8,98%)
# Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	192.118.986	211.074.852	(18.955.866)	(8,98%)
a. Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL	14.858.314	25.989.852	(11.131.538)	(42,83%)
b. Penerimaan kembali Belanja Barang TAYL	177.260.672	183.235.000	(5.974.328)	(3,26%)
c. Penerimaan Kembali Modal TAYL	-	1.850.000	(1.850.000)	
d. Pendapat Perolehan Aset Lainnya	-		-	-
# Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-		-	-
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(246.912.593)	1.668.149.178	(1.915.061.771)	(114,80%)

Defisit dari pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2023 dikarenakan adanya kerugian penghapusan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp445.821.578,00. Adapun surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya diperoleh dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu atas Belanja Pegawai sebesar Rp14.858.314,00 dan Belanja Barang sebesar Rp177.260.672,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp17.351.852.200

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp17.351.852.200,00 dan Rp19.116.114.279,00.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus (Defisit) LO
Rp(637.276.771.017)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp(637.276.771.017,00) dan (Rp455.563.239.989,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0 Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH EKUITAS

Koreksi yang Menambah Ekuitas (Rp684.750) Saldo Koreksi yang menambah ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah bersaldo minus Rp684.750,00. Adapun pada 31 Desember 2022 bersaldo minus Rp115.924.476,00. Saldo Koreksi yang mengurangi ekuitas tahun 2023 merupakan saldo atas transaksi kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja pemeliharaan sebesar minus Rp4.578.750,00 dan koreksi saldo utang kepada pihak ketiga lainnya dikarenakan adanya kesalahan pembentukan jurnal otomatis pada Aplikasi SAKTI sebesar Rp3.894.000,00.

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas Rp649.593.096.656 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp649.593.096.656,00 dan Rp453.914.902.386,00. Transfer masuk merupakan transfer aset berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp255.575.758,00. Terdapat pengesahan hibah langsung sebesar Rp137.028.856.836,00. Rincian Transaksi antar Entitas s.d. 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel 42
Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Jenis Beban	Nilai (Rp)
Diterima dari Entitas Lain	(243.841.124)
Ditagihkan ke Entitas Lain	512.552.505.186
Transfer Masuk	255.575.758
Pengesahan Hibah Langsung	137.028.856.836
Jumlah	649.593.096.656

E.6. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan Bendahara Umum Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp243.841.124,00), sedangkan DKEL sebesar Rp512.552.505.186,00. Rincian DDEL dan DKEL per satker adalah sebagai berikut:

Diterima dari Entitas
Lain (Rp243.841.124)

Tabel 43
Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Jenis Beban	Nilai (Rp)
Satker 427752	(232.867.625)
Satker 427755	(10.973.499)
Jumlah	(243.841.124)

Ditagihkan ke Entitas
Lain Rp512.552.505.186

Tabel 44
Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Jenis Beban	Nilai (Rp)
Satker 427752	455.293.589.898
Satker 427755	57.258.915.288
Jumlah	512.552.505.186

E.7. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp137.028.856.836

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp137.028.856.836,00. Detail mengenai kegiatan pengesahan hibah langsung TA 2023 dapat dilihat pada poin F.4.4. Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Pengesahan Hibah

Satker	Nilai (Rp)
Satker 427752	137.028.856.836
Satker 427755	-
Jumlah	137.028.856.836

E.8. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir
Rp29.667.493.089

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.667.493.089,00 dan Rp17.351.852.200,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan dua rekening untuk menampung uang keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN, yaitu:

- Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) mengelola rekening Induk pada Bank Mandiri Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 1030007727577, yang bersaldo sebesar Rp0,00 per tanggal 31 Desember 2023.
- Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) mengelola rekening Induk pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 651164277551000 yang bersaldo sebesar Rp0,00 per tanggal 31 Desember 2023.

F.2. PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

F.2.1 REALISASI PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) I dan Fungsi APBN Ekonomi 04.

Pagu Anggaran PN I Adalah Rp14.026.894.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp13.995.609.031,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN I dan Fungsi APBN Ekonomi 04 antara lain sebagai berikut:

Tabel 46
Program/Kegiatan dalam PN I dan Fungsi APBN Ekonomi 04

Program	Kegiatan	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran Target Volume Keluaran	Target Volume Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Persentase Realisasi Volume Keluaran
Program Koordinasi Pelaksanaan kebijakan	2519. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	769.942.000	769.862.081	99,99%	1,00	1,00	100%
		PBK.002. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor	508.827.000	508.772.120	99,99%	1,00	1,00	100%
		PBK.003. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	601.945.000	601.847.696	99,98%	1,00	1,00	100%
	2521. Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan	PBB.001. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bermilai Tambah Tinggi	904.445.000	904.442.454	100,00%	1,00	1,00	100%
		PBB.002. Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	904.120.000	904.118.535	100,00%	1,00	1,00	100%
	4545. Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1.500.000.000	1.494.398.370	99,63%	1,00	1,00	100%
	4550. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	PBK.001. Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	8.837.615.000	8.812.167.775	99,71%	2,00	2,00	100%
	Total		14.026.894.000	13.995.609.031	99,78%			

F.2.2 ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, TARGET DAN REALISASI OUTPUT TEMATIK APBN TAHUN 2023

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak memiliki tagging Tematik APBN Tahun 2023.

F.2.3 CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2023

Selama periode Tahun Anggaran 2023, *Output Strategis* yang telah dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional
 - a. Rekomendasi kebijakan terkait koordinasi pengendalian inflasi yaitu strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi 2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun arahan Presiden RI secara langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023.
 - b. Rekomendasi kebijakan terkait evaluasi kinerja TPID yaitu Hasil evaluasi kinerja TPID yang ditetapkan melalui Keputusan Menko Perekonomian serta menjadi usulan kepada Kementerian Keuangan untuk kebijakan alokasi Insentif Fiskal TA 2024.
2. Koordinasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
 - a. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan pembiayaan UMKM melalui perluasan penerima KUR kepada debitur baru KUR.
 - b. Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi penyaluran KUR kepada debitur graduasi KUR untuk memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Koordinasi Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan
 - a. Rekomendasi Kebijakan penyerapan komoditas pangan dalam negeri dan percepatan realisasi impor untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.
 - b. Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi dampak program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terhadap stabilisasi harga pangan, Perum BULOG perlu meningkatkan volume penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk SPHP menjadi dua kali lipat.

4. Koordinasi Kebijakan Program Kartu Prakerja
 - a. Rekomendasi kebijakan pelaksanaan skema normal program kartu prakerja tahun 2023.
 - b. Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian pelaksanaan Program Kartu Prakerja sesuai kebijakan yang ditetapkan Komite Cipta Kerja dan Tim Pelaksana (tepat sasaran, inklusif, sesuai target, serta tepat guna).
 - c. Rekomendasi pemulihan anggaran Program Kartu Prakerja yang tidak dimanfaatkan oleh penerima yang telah ditetapkan dan diarahkan kepada pendaftar yang belum diterima melalui pembukaan *batch*.
 - d. Rekomendasi perbaikan atas hasil *monitoring* dan evaluasi proses *onboarding* lembaga pelatihan serta pelaksanaan pelatihan offline skema normal program Kartu Prakerja
5. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional
 - a. Rekomendasi Kebijakan Percepatan penyiapan regulasi dan kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030.
 - b. Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Tim Nasional Percepatan Kebijakan Ekonomi Digital yang lintas KL, multi-stakeholders dan lintas sektor guna mendorong penyiapan regulasi dan kebijakan tersebut dan memperkuat ekosistem ekonomi digital dalam 6 Pilar Utama, yaitu: (1) Infrastruktur; (2) SDM; (3) Iklim Bisnis dan Keamanan Siber; (4) Riset, Inovasi, dan Pengembangan Usaha; (5) Pendanaan dan Investasi; serta (6) Regulasi dan Kebijakan.
6. Koordinasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
 - a. Rekomendasi Kebijakan terkait proyek-proyek yang akan beroperasi, pada tahun 2023 telah diterbitkan Permenko 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Permenko 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta Jalur Utara – Selatan.
 - b. Rekomendasi Kebijakan terkait proyek-proyek usulan PSN yang akan dimasukkan sebagai daftar PSN baru, perubahan nomenklatur PSN dan PSN yang akan dikeluarkan dari daftar PSN. Regulasi yang diterbitkan antara lain Permenko 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Daftar PSN dan Permenko 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Daftar PSN.

7. Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Reforma Agraria
 - a. Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (telah ditetapkan pada 3 Oktober 2023 menjadi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria).
 - b. Rekomendasi Kebijakan terkait percepatan pencapaian target legalisasi aset dan redistribusi tanah (akumulasi capaian sampai dengan Desember 2023 Legalisasi Aset telah tercapai 9,31 Juta Hektar dari target 4,5 Juta Hektar, dan Redistribusi Tanah telah tercapai 1,67 Juta Hektar dari target 4,5 Juta Hektar).
8. Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Keketuaan ASEAN 2023 pada Pilar Ekonomi
 - a. Rekomendasi Kebijakan penyelesaian ke-16 prioritas ekonomi Indonesia (*Priority Economic Deliverables*) pada masa Keketuaan di ASEAN 2023.
 - b. Rekomendasi Kebijakan dalam penyusunan referensi dalam penyusunan Visi ASEAN 2045 pada pilar ekonomi melalui Kesepakatan Tingkat Kepala Negara yaitu ASEAN Concord IV dan ASEAN *Leaders Declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth*.
9. Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan khususnya persiapan partisipasi Indonesia dalam Indo Pacific Economic Framework For Prosperity (IPEF):
 - a. Rekomendasi Kebijakan Percepatan penyelesaian penyelesaian Perundingan Kerja Sama Internasional Indo Pacific Economic Framework For Prosperity (IPEF).
 - b. Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Peningkatan Investasi dari Negara-negara di Kawasan melalui Kemitraan Indo Pacific Economic Framework For Prosperity (IPEF).
10. Koordinasi Kebijakan Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus:
 - a. Rekomendasi Kebijakan Pembentukan dan Penetapan 3 (tiga) KEK Baru yaitu usulan penetapan KEK Setangga, KEK Tanjung Sauh, dan KEK Nipa.

F.3. REALISASI BELANJA AKUN KHUSUS COVID-19 PERIODE SEMESTER II TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-24/PB/PB.6/2023, Satker agar tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai semester II tahun 2023. Penggunaan akun khusus COVID-19 yang digunakan pada periode semester II tahun 2023 harus diungkapkan pada CALK. Terdapat realisasi belanja akun khusus COVID-19 pada periode Semester II Tahun 2023 sebesar Rp16.208.958. Rincian realisasi belanja akun khusus COVID-19 pada periode Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Realisasi Belanja Akun Khusus COVID-19
pada Periode Semester II Tahun 2023

Akun	Uraian Akun	Realisasi Semester II TA 2023 (Rp)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	16.208.958

F.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.4.1. LELANG BARANG MILIK NEGARA

Terhadap barang inventaris yang tidak dapat digunakan kembali, telah disampaikan usulan permohonan lelang BMN kendaraan bermotor kepada Kepala KPKNL Jakarta I. Pendapatan atas lelang tersebut kemudian dituangkan dalam salinan risalah lelang Nomor 718/25/2023 tanggal 06 Desember 2023 sebesar Rp6.789.999,00.

F.4.2. TRANSFER MASUK

Terdapat transfer masuk berupa Peralatan dan Mesin dari Kementerian Perindustrian berupa Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor sebesar Rp894.515.155,00 yang telah dilakukan serah terima melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 93/SJ-IND.6/BMN/BA/III/2023. BAST disajikan pada Lampran VII.

F.4.3. REVISI DIPA PAGU ANGGARAN

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat revisi yang dilakukan atas DIPA Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA.035) yaitu pada:

- Satuan Kerja 427752 (Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) melaksanakan Revisi DIPA Nomor DIPA-035.01.1.427752/2023 sebanyak 16 (enam belas) kali, dengan tanggal revisi terakhir 29 Desember 2023 dengan besaran pagu sebesar Rp466.418.924.000,00.

- Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus telah melakukan 8 (delapan) kali revisi DIPA, dengan tanggal revisi terakhir tanggal 29 Desember 2023 dan besaran pagu sebesar Rp57.971.763.000,00.

F.4.4. INFORMASI HIBAH LUAR NEGERI

Informasi mengenai Hibah Langsung tahun 2023 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

a. HIBAH PROSPERA

Hibah Jasa tersebut berdasarkan pada perjanjian hibah yang tertuang dalam Subsidiary Arrangement (SA) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tanggal 4 Desember 2017, dengan masa perjanjian oleh kedua belah pihak untuk periode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2023 dengan total alokasi nilai hibah sebesar AUD 145.000.000 dan teregister dengan nomor 23TSV7CA. Kegiatan hibah yang dibiayai dari pemerintah Australia dilaksanakan melalui proyek Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA) yang dilaksanakan oleh 26 Instansi Pemerintah. Pada tanggal 27 Maret 2023 telah dilakukan pengajuan perpanjangan program kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPPR sampai dengan 28 Februari 2026 dengan alokasi nilai hibah menjadi sebesar AUD 259.000.000

Realisasi kegiatan hibah untuk tahun 2019 sebesar Rp76.836.389.526,00, untuk kegiatan Tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp141.911.292.772,00, dan untuk kegiatan Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp128.058.431.254,00. Realisasi kegiatan hibah tahun 2022 sebesar Rp124.368.030.608,00, dilakukan serah terima dengan BAST Nomor BA-8/SET.M.EKON.4/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 dan disahkan dengan Persetujuan MPHL-BJS Nomor 88553147801681090 tanggal 28 Februari 2023. Untuk kegiatan Tahun 2023 belum ada BAST dan Pengesahan.

b. Hibah KIAT

Hibah Jasa Fasilitas Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur (KIAT) telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan nomor 2FR4C6KA, dengan masa perjanjian oleh kedua belah pihak untuk periode 13 Februari 2017 sampai dengan 13 Juni 2027 dengan alokasi pagu sebesar AUD 150.000.000. Sampai dengan Tahun 2023 telah dilakukan BAST dan pengesahan hibah dengan nilai sebesar Rp3.362.101.029,00 dari kegiatan Tahun 2017 s.d. 2022. Realisasi kegiatan hibah tahun 2022 sebesar

Rp1.379.138.121,00, dilakukan serah terima dengan BAST Nomor BA-15/SET.M.KOM.4/01/2023 tanggal 3 Maret 2023 dan disahkan dengan Persetujuan MPHL-BJS Nomor 88780210805496647 tanggal 10 Maret 2023. Untuk kegiatan Tahun 2023 belum ada BAST dan Pengesahan.

c. Hibah Jutpi Phase 3

Hibah Jasa Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) Phase 3 telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan nomor register 2YT3M6QA dengan pagu sebesar JPY 418.206.000. Hibah tersebut dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Jepang dan Indonesia dengan periode 26 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2025. Untuk kegiatan hibah tahun 2022 dan 2023 belum ada BAST dari *budget plan* Tahun 2022 sebesar JFY 167,00 Juta dan Tahun 2023 sebesar JFY 111,00 Juta.

d. Hibah FOLUR – UNDP

Hibah FOLUR-UNDP telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan nomor register 2ELXFXTA dengan pagu sebesar USD 8.511.012,34. Hibah Jasa dan Uang tersebut dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan UNDP dengan periode 03 Maret 2023 s.d. 28 Februari 2028. Realisasi kegiatan hibah jasa tahun 2023 sebesar Rp4.174.833.926,00, dilakukan serah terima dengan BAST Nomor BAST-04/SET.M.EKON.1/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan disahkan dengan Persetujuan MPHL-BJS Nomor 814691243880866561 tanggal 31 Desember 2023.

Pada tahun 2023 Kemenko Bidang Perekonomian menerima dana Hibah Uang yang berasal dari UNDP untuk kegiatan Hibah FOLUR dengan total penerimaan sebesar Rp7.598.314.789,00. Atas dana tersebut, telah diajukan pengesahan hibah uang melalui KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp6.677.583.142,00 dan telah dilakukan pengembalian dana ke donor sebesar Rp920.731.647,00 dengan SP2HL Nomor 07795A tanggal 31 Desember 2023.

e. Hibah FOLUR – FAO

Hibah Jasa FOLUR-FAO telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan nomor register 2KUKEPQA dengan pagu sebesar USD 460.065,00. Hibah tersebut dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan FAO dengan periode 10

Maret 2023 s.d. 28 Februari 2028. Realisasi kegiatan hibah jasa tahun 2023 sebesar Rp429.271.039,00, dilakukan serah terima dengan BAST Nomor BAST-05/SET.M.EKON.1/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 dan disahkan dengan Persetujuan MPHL-BJS Nomor 814653999880747763 tanggal 29 Desember 2023.

F.4.5. TRANSAKSI RESIPROKAL

Sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-5/PB/PB.6/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Kementerian/Lembaga, bahwasanya terdapat transaksi resiprokal antara Kemenko Bidang Perekonomian dengan beberapa Instansi Pemerintah Lainnya diantaranya sebagai berikut:

Tabel 48
Transaksi Resiprokal
Kemenko Bidang Perekonomian dengan Instansi Pemerintah Lainnya
Tahun 2023

No	Pengirim		Penerima		Nilai (Rp)
	Kode Satker	Nama Satker	Kode Satker	Nama Satker	
1	427752	Menko Bidang Perekonomian	237200	Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP)	245.361.000
2	427752	Menko Bidang Perekonomian	416233	Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BPPK) Jakarta	73.215.000
3	427752	Menko Bidang Perekonomian	450417	Lembaga Administrasi Negara Jakarta	315.200.000
4	427755	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	418929	Pusat Jasa Kearsipan	102.000.000

F.4.6. INFORMASI TUNTUTAN HUKUM

Terdapat informasi tuntutan hukum atas perkara nomor 451/PK/PDT/2019 dengan pokok gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benada materiil dan immateriil pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999. Terkait dengan progress penyelesaian perkara tersebut, saat ini masih dalam proses perhitungan alokasi ganti rugi oleh Tim Panel yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial dan belum ada perkembangan lanjutan mengenai informasi posisi terakhir atas tindak lanjut putusan pengadilan dimaksud antara lain terkait dengan informasi posisi terakhir atas tindak lanjut pengadilan dimaksud termasuk atas penganggaran dan nilai tertanggungnya.

LAMPIRAN PENDUKUNG

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 718/25/2023

-----Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (05-12-2023), dimulai pukul sepuluh lebih sepuluh menit (10:10) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

---- Rizki Saktiadani Sulistiyono, Sarjana Komputer, NIP 19890930 201502 1 004 ----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KM.6/2017 tanggal 25 Juli 2017, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-2464/KNL.0701/2023 tanggal 22 November 2023, dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian kaki Risalah Lelang ini dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Dewan Nasional KEK, Gedung MNC Tower Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta. -----

----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Susiwijono Moegiarso, NIP 19690707 198912 1 001, jabatan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor KEK/973.1/SES.M.EKON/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-3085/KNL.0701/2023 tanggal 21 November 2023 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-228/MK.6/KNL.0701/2023 tanggal 16 Oktober 2023. -----

----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Noviar Iskandar, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, NIP 19761115 200501 1 006 berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor BMN.03.11/181/SJ.DNKEK.5/10/2023 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta I. -----

----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----

1. 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 2WD MT, Tahun 2011, Nomor Polisi B 1498 PQO, Nomor Rangka MHBF2CG3FBJ005078, Nomor Mesin MR20011852R, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp106.200.000,00 (seratus enam juta dua ratus ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gedung MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340. -----

2. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina XV AT, Tahun 2011, Nomor Polisi B 1496 PQO, Nomor Rangka MHBG1CG1ABJ056475, Nomor Mesin HR15975573A, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gedung MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340. -----

3. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina XV AT, Tahun 2011, Nomor Polisi B 1497 PQO, Nomor Rangka MHBG1CG1ABJ058006, Nomor Mesin HR15976279A, kondisi rusak berat -----

Nilai Limit : Rp68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gedung MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340. -----

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

4. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina XV AT, Tahun 2011, Nomor Polisi B 1499 PQO, Nomor Rangka MHBG1CG1ABJ058007, Nomor Mesin HR15976271A, kondisi rusak berat -----
Nilai Limit : Rp68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gedung MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340. -----
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TA MT, tahun 2011, Nomor Polisi B 6805 PRQ, Nomor Mesin JB91E2895692, Nomor Rangka MH1JB9128BK904425, kondisi rusak berat -----
Nilai Limit : Rp6.268.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gedung MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340. -----
dilelang apa adanya. -----
-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Surat Kabar Harian Koran Jakarta tanggal 29 November 2023. -----
-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----
-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----
-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----
1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (closed bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ---
-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan,

maka:../Lembar Ketiga

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----

2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan

Pejabat Lelang

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----

2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----

2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai

Ttd.

Rizki Saktiadani Sulistiyono, S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta I. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah satu penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan

disetujui Penjual,.../Lembar Keenam

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 718/25/2023 tanggal 5 Desember 2023

Banyaknya barang yang dilelang: 5 (lima) -----

Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----

Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp6.789.999,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) -----

Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp312.600.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) -----

Jumlah harga barang yang ditahan: -----

Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 18 (delapan belas) -----

Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Noviar Iskandar, S.E., M.Si.
NIP 19761115 200501 1 006

Rizki Saktiadani Sulistiyono,
S.Kom.
NIP 19890930 201502 1 004

Saksi II

Saksi I

Ttd.

Ttd.

Hary Gunawan
NIP 19951003 201801 1 002

T. Ima Putri Oktavia
NIP 19911013 201411 2 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 06 DEC 2023

Pin Kepala KPKNL Jakarta I



Warsudin

NIP 19660812 199103 1 003 ²¹



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231206216963
Tanggal Billing	: 06-12-2023 14:15:04
Tanggal Kedaluwarsa	: 13-12-2023 14:15:04
Tanggal Bayar	: 06-12-2023 14:48:58
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 035 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Unit Eselon I	: 01 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Satuan Kerja	: 427755 - SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Total Disetor	: 6.789.999 (IDR)
Terbilang	: Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000761749
NTPN	: FA01D3CIFBI03983

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 6.789.999 (IDR)
Keterangan	: HBL RL-718/25/2023 05.12.23



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231206219034
Tanggal Billing	: 06-12-2023 14:17:10
Tanggal Kedaluwarsa	: 13-12-2023 14:17:10
Tanggal Bayar	: 06-12-2023 14:48:58
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	: 135.800 (IDR)
Terbilang	: Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000761751
NTPN	: D264748VV64CGB8Q

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 135.800 (IDR)
Keterangan	: RL-718/25/2023

**Lampiran II Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2023**

No.	Kode Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Kode	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Ket
						Nomor	Tanggal			
1	427752	8100-1242-7752-1000	BPG 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	20	S-258/SES.M.EKON/05/2020	27/05/2020	31/12/2023	Rp -	-
2	427752	8100-1242-7752-1001	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	29/12/2023	Rp -	-
3	427752	8100-1242-7752-1002	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	11/12/2023	Rp -	-
4	427752	8100-1242-7752-1003	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	29/12/2023	Rp -	-
5	427752	8100-1242-7752-1004	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	29/12/2023	Rp -	-
6	427752	8100-1242-7752-1005	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	18/12/2023	Rp -	-

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

No.	Kode Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Kode	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Ket
						Nomor	Tanggal			
7	427752	8100-1242-7752-1006	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	28/12/2023	Rp -	-
8	427752	8100-1242-7752-1007	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	20/12/2023	Rp -	-
9	427752	8100-1242-7752-1008	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	20/12/2023	Rp -	-
10	427752	8100-1242-7752-1009	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	29/12/2023	Rp -	-
11	427752	8100-1242-7752-1010	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	22/12/2023	Rp -	-

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

No.	Kode Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Kode	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Ket
						Nomor	Tanggal			
12	427752	8100-1242-7752-1011	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	29/12/2023	Rp -	-
13	427752	8100-1242-7752-1012	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	29/12/2023	Rp -	-
14	427752	8100-1242-7752-1013	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-286/WPB.12/KP.02/2021	29/01/2021	20/12/2023	Rp -	-
15	427752	8100-1242-7752-1014	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-690/KPN.1202/2022	27/09/2023	28/12/2023	Rp -	
16	427752	8100-1242-7752-1015	BPP 019 MENKO PEREKONOMIAN	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	21	S-690/KPN.1202/2022	18/05/2022		Rp -	

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

No.	Kode Satker	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank / Kantor Pos	Kode	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Ket
						Nomor	Tanggal			
17	427752	10-300-1047130-4	RPL 140 PDHL KEMKO EKON untuk 2ELXFXTA	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	30	000348	06/04/2023	27/12/2023	Rp -	
18	427752	10-300-1051006-9	RPL 140 PDH KEMKO EKON untuk 2ELXFXTA	Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan	30	000349	12/04/2023	31/12/2023	Rp -	
19	427755	6511-6427-7551-000	BPG 019 BA 69 PEREKONOMIAN	Bank Rakyat Indonesia KCP Departemen Keuangan	20	S-260/SES.M.EKON/05/2020	29/05/2020	28/12/2023	Rp -	-
									Rp -	

Lampiran III Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Uraian	Satker		Jumlah (Rp)
		427752 (Rp)	427755 (Rp)	
1	Penerimaan uang pengembalian belanja lewat tahun 2023	295.562.094	-	295.562.094
2	Penerimaan uang potongan pajak yang belum disetor	7.385.737	-	7.385.737
Jumlah		302.947.831	-	302.947.831

Lampiran IV Piutang Bukan Pajak dan Perhitungan Penyisihannya

Keterangan	Nominal (Rp)
Piutang PPNPN Satker Menko 427752	5.797.460
Piutang PPNPN Satker KEK 427755	4.633.950
Total	10.431.410
Penyisihan Piutang (0,5%)	52.157

Lampiran V Daftar Belanja yang Masih Harus Dibayar

Kode Akun	No	Uraian	Nominal per 31 Desember 2023 (Rp)
212111		Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	
	1	PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI TUNJANGAN KINERJA SUSULAN BULAN JANUARI TAHUN 2024 UNTUK 1 PEGAWAI	5.166.984
	2	PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI TUNJANGAN KINERJA SUSULAN BULAN JANUARI TAHUN 2024 UNTUK 1 PEGAWAI	2.413.373
	3	PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI TUNJANGAN KINERJA BULAN JANUARI TAHUN 2024 UNTUK 337 PEGAWAI	2.507.358.905
	4	PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI TUNJANGAN KINERJA BULAN JANUARI TAHUN 2024 UNTUK 122 PEGAWAI	1.129.059.340
	5	PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI TUNJANGAN KINERJA BULAN JANUARI TAHUN 2024 UNTUK 4 PEGAWAI	110.310.000
	6	PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI TUNJANGAN KINERJA BULAN JANUARI TAHUN 2024 UNTUK 1 PEGAWAI MENTRI	49.860.000
	7	PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI TUNJANGAN KINERJA BULAN JANUARI TAHUN 2024 UNTUK 175 PEGAWAI	792.451.051
	8	PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI TUNJANGAN KINERJA BULAN JANUARI TAHUN 2024 KEK	287.418.710
		Subtotal	4.884.038.363
212112		Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	
	1	Tagihan Listrik Desember Satker 427752	286.136.342
	2	Tagihan Listrik Desember Satker 427755	4.244.375
	3	Tagihan Telepon Desember 427752	4.027.230
	4	Tagihan Telepon Desember 427755	466.630
		Subtotal	294.874.577
212191		Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (Pembayaran RPATA)	
	1	Pembayaran JASA KONSULTANSI PERORANGAN DEPUTI DIREKTUR PENGEMBANGAN MOBILITAS DAN PERKOTAAN KPPIP TAHUN 2023 sesuai BAST Nomor BAST-12/PPK.KPPiP/TA-MOBILITAS-PERKOTAAN/12/2023 ,Tanggal 31-12-2023	55.000.000
	2	Pembayaran Sewa Meubelair dan AC Tahun Anggaran 2023 sesuai PRJ-91/PPK.SET.I/SM/02/2023 tanggal 8 Februari 2023 BAST-642/PPK.SET.I/SM/02/2023 tanggal 31 Desember 2023 BAP-642/PPK.SET.I/SM/02/2023 tanggal 31 Desember 2023	175.057.777
	3	Pembayaran JASA KONSULTANSI PERORANGAN DEPUTI DIREKTUR PENINGKATAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH KPPIP TAHUN 2023 sesuai BAST Nomor BAST-12/PPK.KPPiP/TA-KONEK-WIL/12/2023, Tanggal 31-12-2023	55.000.000
	4	Pembayaran JASA KONSULTANSI PERORANGAN DIREKTUR PROGRAM KPPIP TAHUN 2023 sesuai BAST Nomor BAST-12/PPK.KPPiP/DIREKTUR-PROGRAM/12/2023, Tanggal 31-12-2023 (KPPIP)	87.000.000
	5	Pembayaran JASA KONSULTANSI PERORANGAN DEPUTI DIREKTUR PEMANFAATAN SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL KPPIP TAHUN 2023 sesuai BAST Nomor BAST-12/PPK.KPPiP/TA-PEMANFAATAN-ESDM/12/2023, Tanggal 31-12-2023	55.000.000
	6	Pembayaran Pembayaran Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy sesuai PRJ-914/PPK.SET.I/SF/12/2022 tgl 30-12-2022 Adendum no:Add-02 tgl 30 november 2023 BAST-662/PPK.SET.I/SF/12/2023 tgl 31-12-2023 BAP-662/PPK.S ET.I/SF/12/2023 tgl 31-12-2023	161.193.090
	7	Pembayaran Pengadaan Jasa Langganan Layanan Sambungan Internet (ISP1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 sesuai PERJ-45/PPK.KEG.2486/ISP1/12/2022 tgl 30-12-2022, BASTP-1 2.04/PPK.KEG.2486/ISP1/12/2023 tgl 31-1	702.000.000
	8	Pembayaran Pengadaan Jasa Langganan Layanan Sambungan Internet (ISP2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 sesuai PERJ-46/PPK.KEG.2486/ISP2/12/2022 tgl 30-12-2022, BASTP-1 3.04/PPK.KEG.2486/ISP2/12/2023 tgl 31-1	702.000.000
	9	Pembayaran Pengadaan Jasa Langganan Database Global Analytics Suite(GTAS) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2023 sesuai PERJ-21/PPK.KEG.2486/GTAS/08/2023 tgl 01-08-2023,BASTP - 21.02/PPK.KEG.2486/GTAS/12/2023 tgl 31	259.296.000
	10	Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Langganan Data CEIC Economic Time-Series Database Termin II untuk Kemenko Perekonomian RI Tahun Anggaran 2023 sesuai PERJ-01/PPK.KEG.5032/CEIC/01/2023 tgl 02-01-2023, BASTP-01.2/PPK.KEG.5032/CEIC/12/2023 tg	177.901.920
	11	Pembayaran Pengadaan jasa Event Organizer (EO) Kegiatan Outlook Perekonomian Indonesia 2024 sesuai SP-58/PPK.KEG.5032/EO/12/2023 tgl 19-12-2023, BASTP-58/PPK.KEG.5032/EO/12/2023 Tgl 29-12-2023, ADDEND UM SP-58/PPK.KEG.5032/EO.ADD/12/2023 Tg	4.334.608.029
	12	Pembayaran Jasa Building Management sesuai Kontrak Nomor PERJ-928/PPK.SET.I/BM/12/2022 tanggal 31-12-2022, ADD-02 tanggal 28-11-2023 BAST/BAPP Nomor BAST-694/PPK.SET.I/BM/12/2023 Tanggal 31-12-2023	885.323.871
	13	Pembayaran Jasa Konsultasi Perorangan Tenaga Ahli Strategi Komunikasi dan Publikasi terkait Kebijakan Strategis Pemerintah di Bidang Perekonomian sesuai SPK-07/PPK.KEG.4538/TA/II/2023 Tgl 16-02-2023 B ASTHP.1-07/PPK.KEG.4538/TA/XII/2023 Tgl	72.000.000
	14	Pembayaran Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Layanan Jasa Monitoring, Analisis Percakapan dan Pemberitaan Media Sosial sesuai SPK-27/PPK.KEG.4538/MEDIA.MONITORING/08/2023 tgl 01-08-2023 , BASTP-27/PPK.KEG.4538/MEDIA.MONITORING/12/2023 Tgl 31-1	95.460.000
		Subtotal	7.816.840.687
		Total	12.995.753.627

Lampiran VI Saldo Daftar Utang Pajak Belum Disetor

NO	Kode Akun Pajak	Nilai
1	411121	1.458.000
2	411124	828.108
3	411211	4.459.462
5	411122	640.167
Total		7.385.737

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp : 5255509

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA UNTUK DIOPERASIONALKAN
BERUPA ALAT ANGKUTAN BERMOTOR
KEPADA SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN
NOMOR : 93 /SJ-IND.6/BMN/BA/III/2023**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-03-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Syahroni Ahmad.
NIP : 197902022002121003
Jabatan : Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Hari Kristijo
NIP : 19661226 1995031001
Jabatan : Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Perekonomian
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Timur No 2, RW 4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Kementerian Koordinator Perekonomian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang milik negara kepada **PIHAK KEDUA** untuk dioperasikan yaitu berupa 1 (satu) unit alat angkutan bermotor dengan nilai perolehan sebesar Rp. 894.515.155,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima belas ribu seratus lima puluh lima rupiah).
2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima barang tersebut pada angka 1 (satu) dari **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan cukup, lengkap, berfungsi dengan baik sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** menjamin BMN yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** bukan merupakan barang sengketa.
4. Status barang dalam Berita Acara ini masih tercatat sebagai Inventaris Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian sampai seluruh proses administrasi dan migrasi Alih Status terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,
Kepala Biro Umum,
Sekretariat Kementerian Koordinator
Perekonomian,



Hari Kristijo
NIP.19661226 1995031 001

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Kepala Biro Umum,
Sekretariat Jenderal Kementerian
Perindustrian,



Syahroni Ahmad
NIP.19790202 200212 1 003

LAMPIRAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA UNTUK DIOPERASIONALKAN
BERUPA ALAT ANGKUTAN BERMOTOR
KEPADA SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN
NOMOR : 9³ /SJ-IND.6/BMN/BA/III/2023

No	Kode Barang	Nama Barang / Spesifikasi	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	3020102999	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya Spesifikasi: Mitsubishi Outlander PHEV Nomor Polisi B 1458 SQH	1 Unit	Rp. 894.515.155	Rp. 894.515.155
TOTAL					Rp. 894.515.155

Terbilang: delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima belas ribu seratus lima puluh lima rupiah

PIHAK KEDUA
 Yang Menerima,
 Kepala Biro Umum.
 Sekretariat Kementerian Koordinator
 Perekonomian,



Hari Kristijo
 NIP.19661226 199503 1 001

PIHAK PERTAMA
 Yang Menyerahkan,
 Kepala Biro Umum,
 Sekretariat Jenderal Kementerian
 Perindustrian,



Syahroni Ahmad
 NIP. 19790202 200212 1 003

Lampiran VIII
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 035

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 11:19 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_kl_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	243,841,124	243,841,124	0	0	1,802,322,673	1,802,322,673	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	243,841,124	243,841,124	0	0	1,802,322,673	1,802,322,673	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	243,841,124	243,841,124	0	0	1,802,322,673	1,802,322,673	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	524,390,687,000	519,230,088,328	(5,160,598,672)	99	438,832,116,000	434,688,843,042	(4,143,272,958)	99
1. Belanja Pegawai	110,381,651,000	108,996,042,072	(1,385,608,928)	99	110,280,097,000	108,957,180,694	(1,322,916,306)	99
2. Belanja Barang	397,546,980,000	393,801,489,489	(3,745,490,511)	99	320,629,879,000	317,822,278,186	(2,807,600,814)	99
3. Belanja Modal	16,462,056,000	16,432,556,767	(29,499,233)	100	7,922,140,000	7,909,384,162	(12,755,838)	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 035

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 11:19 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_kl_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	524,390,687,000	519,230,088,328	(5,160,598,672)	99	438,832,116,000	434,688,843,042	(4,143,272,958)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Berikut Laporan Realisasi Anggaran lainnya:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/24 11:33 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	28,874,661,000	28,707,261,000	28,389,979,340	1,827,815	28,388,151,525	98.89	319,109,475
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	443,000	425,000	413,600	88	413,512	97.32	11,488
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,636,862,000	1,679,982,000	1,662,179,110	0	1,662,179,110	98.94	17,802,890
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	423,149,000	425,908,000	421,386,834	0	421,386,834	98.94	4,521,166
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	6,491,170,000	2,556,960,000	2,522,165,000	0	2,522,165,000	98.64	34,795,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	457,404,000	2,481,700,000	2,456,494,000	1,101,493	2,455,392,507	98.98	26,307,493
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	201,271,000	253,406,000	245,806,566	0	245,806,566	97	7,599,434
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,426,580,000	1,406,930,000	1,390,753,680	0	1,390,753,680	98.85	16,176,320
511129	Belanja Uang Makan PNS	8,552,064,000	3,912,584,000	3,707,888,000	0	3,707,888,000	94.77	204,696,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	935,970,000	868,770,000	858,900,000	9,380,626	849,519,374	98.86	19,250,626
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	48,999,574,000	42,293,926,000	41,655,966,130	12,310,022	41,643,656,108	98.49	650,269,892
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	262,500,000	294,250,000	284,375,000	0	284,375,000	96.64	9,875,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	262,500,000	294,250,000	284,375,000	0	284,375,000	96.64	9,875,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	198,057,000	186,257,000	184,836,000	0	184,836,000	99.24	1,421,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	198,057,000	186,257,000	184,836,000	0	184,836,000	99.24	1,421,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	101,586,357,000	67,607,218,000	66,883,174,964	0	66,883,174,964	98.93	724,043,036
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	101,586,357,000	67,607,218,000	66,883,174,964	0	66,883,174,964	98.93	724,043,036
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	151,046,488,000	110,381,651,000	109,008,352,094	12,310,022	108,996,042,072	98.76	1,385,608,928
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	8,524,440,000	6,054,712,000	6,048,922,246	0	6,048,922,246	99.9	5,789,754
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20,000,000	0	0	0	0		0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	321,651,000	16,529,000	15,783,000	0	15,783,000	95.49	746,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,549,920,000	1,625,008,000	1,621,850,000	8,812,000	1,613,038,000	99.81	11,970,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,629,400,000	3,033,266,000	3,032,754,632	0	3,032,754,632	99.98	511,368
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,280,186,000	522,211,000	521,686,877	0	521,686,877	99.9	524,123
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	15,325,597,000	11,251,726,000	11,240,996,755	8,812,000	11,232,184,755	99.9	19,541,245
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	16,849,619,000	15,961,660,000	15,619,435,539	0	15,619,435,539	97.86	342,224,461

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/24 11:33 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,823,930,000	6,981,733,000	6,967,685,000	29,350,132	6,938,334,868	99.8	43,398,132
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,841,874,000	1,070,880,000	1,069,826,287	0	1,069,826,287	99.9	1,053,713
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	996,000,000	11,400,000	11,379,720	0	11,379,720	99.82	20,280
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	87,881,000	87,880,750	0	87,880,750	100	250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	31,511,423,000	24,113,554,000	23,756,207,296	29,350,132	23,726,857,164	98.52	386,696,836
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9,092,369,000	4,983,139,000	4,974,595,830	0	4,974,595,830	99.83	8,543,170
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	240,000,000	557,225,000	555,472,885	0	555,472,885	99.69	1,752,115
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	500,000,000	41,100,000	41,011,000	0	41,011,000	99.78	89,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	9,832,369,000	5,581,464,000	5,571,079,715	0	5,571,079,715	99.81	10,384,285
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	4,545,000,000	4,677,658,000	4,677,080,489	0	4,677,080,489	99.99	577,511
522112	Belanja Langganan Telepon	761,400,000	58,541,000	57,801,017	0	57,801,017	98.74	739,983
522113	Belanja Langganan Air	0	18,000,000	17,608,385	0	17,608,385	97.82	391,615
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10,263,244,000	6,939,386,000	6,907,665,543	0	6,907,665,543	99.54	31,720,457
522131	Belanja Jasa Konsultan	28,797,304,000	14,393,220,000	14,335,906,468	0	14,335,906,468	99.6	57,313,532
522141	Belanja Sewa	77,002,161,000	64,465,566,000	64,450,248,209	7,000,000	64,443,248,209	99.98	22,317,791
522151	Belanja Jasa Profesi	9,962,070,000	4,673,980,000	4,582,469,325	1,640,000	4,580,829,325	98.04	93,150,675
522191	Belanja Jasa Lainnya	49,987,375,000	79,338,715,000	79,151,882,361	2,655,000	79,149,227,361	99.76	189,487,639
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	925,590,000	5,924,000	5,924,000	0	5,924,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	182,244,144,000	174,570,990,000	174,186,585,797	11,295,000	174,175,290,797	99.78	395,699,203
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,560,000,000	4,166,760,000	4,132,991,239	3,656,625	4,129,334,614	99.19	37,425,386
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,403,400,000	3,608,103,000	3,563,829,890	0	3,563,829,890	98.77	44,273,110
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	5,963,400,000	7,774,863,000	7,696,821,129	3,656,625	7,693,164,504	99	81,698,496
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,536,191,000	29,804,000,000	29,624,360,440	13,333,581	29,611,026,859	99.4	192,973,141
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	519,810,000	1,142,720,000	1,098,650,500	450,000	1,098,200,500	96.14	44,519,500
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41,526,917,000	31,163,033,000	30,854,740,188	1,620,000	30,853,120,188	99.01	309,912,812
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36,376,205,000	66,077,026,000	65,178,712,910	410,007,593	64,768,705,317	98.64	1,308,320,683
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	107,959,123,000	128,186,779,000	126,756,464,038	425,411,174	126,331,052,864	98.88	1,855,726,136
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	600,000,000	11,217,036,000	11,141,131,830	0	11,141,131,830	99.32	75,904,170
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	15,125,205,000	34,850,568,000	34,399,147,841	468,419,981	33,930,727,860	98.7	919,840,140
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	15,725,205,000	46,067,604,000	45,540,279,671	468,419,981	45,071,859,690	98.86	995,744,310

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 07/05/24 11:33 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	368,561,261,000	397,546,980,000	394,748,434,401	946,944,912	393,801,489,489	99.3	3,745,490,511
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,500,000,000	15,630,979,000	15,624,576,682	0	15,624,576,682	99.96	6,402,318
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	300,000,000	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	11,800,000,000	15,750,979,000	15,744,576,682	0	15,744,576,682	99.96	6,402,318
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	600,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	600,000,000	0	0	0	0		0
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	17,077,000	17,076,240	0	17,076,240	100	760
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	17,077,000	17,076,240	0	17,076,240	100	760
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	1,040,000,000	694,000,000	670,903,845	0	670,903,845	96.67	23,096,155
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	1,040,000,000	694,000,000	670,903,845	0	670,903,845	96.67	23,096,155
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	13,440,000,000	16,462,056,000	16,432,556,767	0	16,432,556,767	99.82	29,499,233
	JUMLAH BELANJA	533,047,749,000	524,390,687,000	520,189,343,262	959,254,934	519,230,088,328	99.2	5,160,598,672

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 02/05/24 11:13 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,280,186,000	522,211,000	521,686,877	0	521,686,877	99.9	524,123
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,280,186,000	522,211,000	521,686,877	0	521,686,877	99.9	524,123
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	996,000,000	11,400,000	11,379,720	0	11,379,720	99.82	20,280
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	996,000,000	11,400,000	11,379,720	0	11,379,720	99.82	20,280
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	500,000,000	41,100,000	41,011,000	0	41,011,000	99.78	89,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	500,000,000	41,100,000	41,011,000	0	41,011,000	99.78	89,000
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	925,590,000	5,924,000	5,924,000	0	5,924,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	925,590,000	5,924,000	5,924,000	0	5,924,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,701,776,000	580,635,000	580,001,597	0	580,001,597	99.89	633,403
	JUMLAH BELANJA	4,701,776,000	580,635,000	580,001,597	0	580,001,597	99.89	633,403

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 07/05/24 11:34 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan							
2491	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital	27,000,000,000	18,429,400,000	18,324,914,848	6,158,188	18,318,756,660	99.4	110,643,340
2492	Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sektor Eksternal	2,000,000,000	2,056,852,000	2,052,555,784	0	2,052,555,784	99.79	4,296,216
2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	5,000,000,000	3,617,128,000	2,874,098,364	1,640,000	2,872,458,364	79.41	744,669,636
2499	Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri	1,500,000,000	1,660,886,000	1,659,923,905	0	1,659,923,905	99.94	962,095
2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	2,000,000,000	2,897,847,000	2,897,184,090	0	2,897,184,090	99.98	662,910
2501	Koordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah dan Sektor Riil	1,000,000,000	1,581,654,000	1,580,700,740	0	1,580,700,740	99.94	953,260
2503	Koordinasi Kebijakan Fiskal	5,000,000,000	5,083,184,000	5,077,850,507	370,000	5,077,480,507	99.89	5,703,493
2505	Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM	1,500,000,000	1,885,997,000	1,885,857,742	424,400	1,885,433,342	99.97	563,658
2510	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	1,500,000,000	10,911,201,000	10,911,194,045	0	10,911,194,045	100	6,955
2511	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia	4,500,000,000	4,655,706,000	4,625,657,372	438,000	4,625,219,372	99.35	30,486,628
2512	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah	1,900,000,000	2,401,840,000	2,370,624,204	0	2,370,624,204	98.7	31,215,796
2513	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	1,500,000,000	3,721,156,000	3,713,479,029	460,000	3,713,019,029	99.78	8,136,971
2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	6,419,060,000	23,786,066,000	23,733,517,485	7,000,000	23,726,517,485	99.75	59,548,515
2516	Koordinasi Kebijakan Pangan	5,000,000,000	4,998,952,000	4,996,507,284	13,669,381	4,982,837,903	99.68	16,114,097
2518	Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	2,000,000,000	2,381,152,000	2,380,654,862	410,000	2,380,244,862	99.96	907,138
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri	3,000,000,000	2,964,767,000	2,964,509,022	0	2,964,509,022	99.99	257,978
2520	Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan	2,000,000,000	4,389,122,000	4,345,526,700	2,474,270	4,343,052,430	98.95	46,069,570
2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan	2,500,000,000	3,208,565,000	3,208,554,762	0	3,208,554,762	100	10,238

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 07/05/24 11:34 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2524	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan	1,500,000,000	2,035,138,000	2,035,113,856	0	2,035,113,856	100	24,144
2525	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perkebunan	5,000,000,000	5,117,130,000	5,117,087,426	0	5,117,087,426	100	42,574
2526	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Hortikultura	2,000,000,000	2,041,851,000	2,038,706,417	0	2,038,706,417	99.85	3,144,583
2527	Koordinasi Kebijakan Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	1,000,000,000	1,373,830,000	1,367,628,204	0	1,367,628,204	99.55	6,201,796
2528	Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	1,500,000,000	2,160,138,000	2,159,021,223	4,830,695	2,154,190,528	99.72	5,947,472
4539	Koordinasi Kebijakan Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah	5,000,000,000	4,957,129,000	4,956,333,550	710,000	4,955,623,550	99.97	1,505,450
4540	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi	1,000,000,000	1,000,000,000	996,222,503	0	996,222,503	99.62	3,777,497
4541	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur	1,000,000,000	1,340,627,000	1,340,523,831	0	1,340,523,831	99.99	103,169
4542	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata	1,600,000,000	1,472,000,000	1,471,932,338	0	1,471,932,338	100	67,662
4543	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	1,000,000,000	1,000,000,000	999,560,441	0	999,560,441	99.96	439,559
4544	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	6,000,000,000	5,316,312,000	5,306,189,085	2,000,000	5,304,189,085	99.77	12,122,915
4545	Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	2,000,000,000	2,095,680,000	2,082,744,638	1,227,632	2,081,517,006	99.32	14,162,994
4546	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	5,000,000,000	5,517,126,000	5,516,613,132	19,226,686	5,497,386,446	99.64	19,739,554
4547	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	4,000,000,000	3,984,883,000	3,922,661,499	60,000	3,922,601,499	98.44	62,281,501
4548	Koordinasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Kawasan	1,000,000,000	2,400,000,000	2,388,589,032	4,900,096	2,383,688,936	99.32	16,311,064
4549	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	1,800,000,000	1,675,000,000	1,671,412,242	0	1,671,412,242	99.79	3,587,758
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	5,238,771,000	8,837,615,000	8,812,167,775	0	8,812,167,775	99.71	25,447,225
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	37,281,029,000	27,034,178,000	26,770,198,115	269,172,592	26,501,025,523	98.03	533,152,477
5200	Koordinasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	9,500,000,000	8,725,000,000	8,645,304,986	9,974,052	8,635,330,934	98.97	89,669,066
5227	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	2,000,000,000	2,919,500,000	2,914,122,590	0	2,914,122,590	99.82	5,377,410

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 07/05/24 11:34 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5229	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2,500,000,000	3,183,500,000	3,182,612,238	0	3,182,612,238	99.97	887,762
5266	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	17,500,000,000	16,532,063,000	16,484,366,999	0	16,484,366,999	99.71	47,696,001
6920	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK	5,719,898,000	3,550,000,000	3,466,206,410	3,027,168	3,463,179,242	97.55	86,820,758
6921	Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	6,500,906,000	8,100,000,000	8,097,112,073	0	8,097,112,073	99.96	2,887,927
6922	Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerjasama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK	6,718,274,000	13,701,000,000	13,687,128,833	354,041,314	13,333,087,519	97.31	367,912,481
6923	Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian pembangunan KEK	8,104,855,000	4,004,855,000	3,978,507,890	4,994,512	3,973,513,378	99.22	31,341,622
6924	Koordinasi Peraturan Perundang-undangan, Hukum, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	5,300,000,000	3,780,000,000	3,779,453,083	11,296,256	3,768,156,827	99.69	11,843,173
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CL	222,082,793,000	244,486,030,000	242,790,831,154	718,505,242	242,072,325,912	99.307	2,413,704,088
WA	Program Dukungan Manajemen							
2486	Peningkatan Pelayanan Perencanaan	16,599,708,000	12,444,596,000	12,382,743,586	900,500	12,381,843,086	99.5	62,752,914
2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi	4,000,000,000	4,077,228,000	4,069,500,914	2,595,000	4,066,905,914	99.75	10,322,086
2488	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)	216,989,770,000	211,572,013,000	210,001,351,045	183,682,168	209,817,668,877	99.17	1,754,344,123
2489	Pengawasan Inspektorat	1,150,000,000	1,061,939,000	1,093,962,127	36,359,524	1,057,602,603	99.59	4,336,397
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	5,000,000,000	4,617,128,000	4,038,577,380	0	4,038,577,380	87.47	578,550,620
4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan	10,000,000,000	14,618,256,000	14,493,715,165	0	14,493,715,165	99.15	124,540,835
6919	Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Umum dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	57,225,478,000	24,835,908,000	24,641,078,749	17,212,500	24,623,866,249	99.15	212,041,751
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	310,964,956,000	273,227,068,000	270,720,928,966	240,749,692	270,480,179,274	99.083	2,746,888,726
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	533,047,749,000	517,713,098,000	513,511,760,120	959,254,934	512,552,505,186	99.188	5,160,592,814
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 07/05/24 11:34 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2526	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Hortikultura	0	6,677,589,000	6,677,583,142	0	6,677,583,142	100	5,858
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CL	0	6,677,589,000	6,677,583,142	0	6,677,583,142	100	5,858
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	6,677,589,000	6,677,583,142	0	6,677,583,142	100	5,858
	JUMLAH	533,047,749,000	524,390,687,000	520,189,343,262	959,254,934	519,230,088,328	99.2	5,160,598,672

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 07/05/24 11:35 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,789,999	0	6,789,999	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	6,789,999	0	6,789,999	0
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,226,194	433,674	792,520	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	1,226,194	433,674	792,520	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,858,314	0	14,858,314	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	221,400,291	0	221,400,291	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	236,258,605	0	236,258,605	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	244,274,798	433,674	243,841,124	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	244,274,798	433,674	243,841,124	

Lampiran IX
NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data 07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak 07/05/24 11:19 AM
Halaman 1

lap_neraca_kl_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	302,947,831	44,062,407	258,885,424	587.54
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	71,841,633	(71,841,633)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	10,431,410	8,358,819	2,072,591	24.80
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(52,157)	(41,795)	(10,362)	24.79
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	10,379,253	8,317,024	2,062,229	24.80
Persediaan	603,889,690	482,933,148	120,956,542	25.05
JUMLAH ASET LANCAR	917,216,774	607,154,212	310,062,562	51.07
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	93,889,973,772	90,851,248,452	3,038,725,320	3.34
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,231,461,587	2,214,385,347	17,076,240	0.77
Aset Tetap Lainnya	146,140,500	547,639,287	(401,498,787)	(73.31)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(69,481,649,499)	(73,386,341,586)	3,904,692,087	(5.32)
JUMLAH ASET TETAP	26,785,926,360	20,226,931,500	6,558,994,860	32.43
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	11,090,945,832	9,282,906,227	1,808,039,605	19.48
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	7,842,606,562	0	7,842,606,562	0.00
Aset Lain-lain	6,827,053,199	9,532,108,295	(2,705,055,096)	(28.38)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(10,793,116,274)	(16,799,739,272)	6,006,622,998	(35.75)
JUMLAH ASET LAINNYA	14,967,489,319	2,015,275,250	12,952,214,069	642.70
JUMLAH ASET	42,670,632,453	22,849,360,962	19,821,271,491	86.75
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	12,995,753,627	5,489,227,155	7,506,526,472	136.75
Utang Jangka Pendek Lainnya	7,385,737	8,281,607	(895,870)	(10.82)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13,003,139,364	5,497,508,762	7,505,630,602	136.53
JUMLAH KEWAJIBAN	13,003,139,364	5,497,508,762	7,505,630,602	136.53
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	29,667,493,089	17,351,852,200	12,315,640,889	70.98
JUMLAH EKUITAS	29,667,493,089	17,351,852,200	12,315,640,889	70.98
JUMLAH EKUITAS	29,667,493,089	17,351,852,200	12,315,640,889	70.98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	42,670,632,453	22,849,360,962	19,821,271,491	86.75

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data	07/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak	07/05/24 11:19 AM
Halaman	2
	lap_neraca_kl_komparatif

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 11:20 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	302,947,831	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	10,431,410	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	52,157
0.0	117111	Barang Konsumsi	391,236,799	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	69,685,113	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	142,967,778	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	93,889,973,772	0
0.0	134113	Jaringan	2,231,461,587	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	146,140,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	68,456,737,332
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,024,912,167
0.0	162151	Software	4,884,433,200	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	5,318,010,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	888,502,632	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	7,842,606,562	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	1,205,008,172	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	5,622,045,027	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	1,205,008,172
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,329,155,575
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	5,258,952,527
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	4,884,038,363
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	294,874,577
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	7,816,840,687
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	7,385,737
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	512,552,505,186
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	243,841,124	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	255,575,758
0.0	391111	Ekuitas	0	17,351,852,200
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4,578,750	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	3,894,000
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	137,028,856,836
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,789,999
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	792,520
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	14,858,314
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang	0	177,260,672
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	28,384,646,225	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	413,512	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,662,179,110	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 11:20 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	421,386,834	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	2,522,165,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,455,392,507	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	245,806,566	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,390,753,680	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,707,888,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	849,519,374	0
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	284,375,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	184,836,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	67,186,191,338	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	6,034,962,514	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,783,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,613,038,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3,053,584,632	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	521,686,877	0
3.0	521211	Beban Bahan	15,526,843,889	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	6,897,649,868	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,069,826,287	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	11,379,720	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	86,780,750	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	4,667,311,260	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	57,815,321	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	17,608,385	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6,947,577,176	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	9,017,896,468	0
3.0	522141	Beban Sewa	64,422,492,595	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,564,299,325	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	209,170,660,416	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5,924,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,099,889,644	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,544,610,573	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	29,607,997,551	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,098,350,500	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,666,404,188	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	64,543,170,140	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	11,141,131,830	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	33,930,252,737	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8,961,627,914	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 11:20 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	56,118,578	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	737,767,375	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	5,259,375	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	176,486,875	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	11,676,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,378,794,744	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	490,606,365	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	580,722,064	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	10,362	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1,100,000	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	445,821,578	0
JUMLAH			760,670,342,779	760,670,342,779

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 11:22 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	519,230,088,328
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	243,841,124	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,789,999
3.1	425764	Pengembalian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa	433,674	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,226,194
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	14,858,314
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	221,400,291
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	1,827,815
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	28,389,979,340	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	88
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	413,600	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,662,179,110	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	421,386,834	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,522,165,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,101,493
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,456,494,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	245,806,566	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,390,753,680	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,707,888,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	858,900,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	9,380,626
3.0	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	284,375,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	184,836,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	66,883,174,964	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	6,048,922,246	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,783,000	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	8,812,000
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,621,850,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,032,754,632	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	521,686,877	0
3.0	521211	Belanja Bahan	15,619,435,539	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,967,685,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	29,350,132
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,069,826,287	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	11,379,720	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	87,880,750	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,974,595,830	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	555,472,885	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 11:22 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_kl

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	41,011,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	4,677,080,489	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	57,801,017	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	17,608,385	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6,907,665,543	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	14,335,906,468	0
3.0	522141	Belanja Sewa	64,450,248,209	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	7,000,000
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	1,640,000
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,582,469,325	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	79,151,882,361	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	2,655,000
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5,924,000	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	3,656,625
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,132,991,239	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,563,829,890	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	13,333,581
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,624,360,440	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,098,650,500	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	450,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,854,740,188	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	1,620,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	410,007,593
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	65,178,712,910	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	11,141,131,830	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar	0	468,419,981
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	34,399,147,841	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,624,576,682	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	120,000,000	0
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	17,076,240	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	670,903,845	0
JUMLAH			520,433,618,060	520,433,618,060

Keterangan :

FINAL

Lampiran X

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 11:17 AM

Halaman : 1

lap_lo_kl

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	792,520	0	792,520	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	792,520	0	792,520	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	792,520	0	792,520	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	109,295,553,146	108,618,302,334	677,250,812	0.624
Beban Persediaan	4,959,516,808	4,457,875,547	501,641,261	11.253
Beban Barang dan Jasa	333,704,220,483	212,343,338,230	121,360,882,253	57.153
Beban Pemeliharaan	8,135,106,582	13,128,995,299	(4,993,888,717)	(38.037)
Beban Perjalanan Dinas	170,987,306,946	107,732,136,167	63,255,170,779	58.715
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	1,220,362,973	(1,220,362,973)	(100)
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 11:17 AM

Halaman : 2

lap_lo_kl

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9,948,936,617	9,730,779,673	218,156,944	2.242
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	10,362	(401,056)	411,418	(102.58 4)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	637,030,650,944	457,231,389,167	179,799,261,777	39.323
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(637,029,858,424)	(457,231,389,167)	(179,798,469,257)	39.323
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(439,031,579)	1,457,074,326	(1,896,105,905)	(130.13 1)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6,789,999	1,457,074,326	(1,450,284,327)	(99.534)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	445,821,578	0	445,821,578	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	192,118,986	211,074,852	(18,955,866)	(8.981)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	192,118,986	226,474,852	(34,355,866)	(15.17)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	15,400,000	(15,400,000)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(246,912,593)	1,668,149,178	(1,915,061,771)	(114.80 2)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(637,276,771,017)	(455,563,239,989)	(181,713,531,028)	39.888
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(637,276,771,017)	(455,563,239,989)	(181,713,531,028)	39.888

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 11:18 AM

Halaman : 1

lap_lpe_kl

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	17,351,852,200	19,116,114,279	(1,764,262,079)	(9.229)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(637,276,771,017)	(455,563,239,989)	(181,713,531,028)	39.888
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(684,750)	(115,924,476)	115,239,726	(99.409)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(4,578,750)	(115,924,476)	111,345,726	(96.05)
LAIN-LAIN	3,894,000	0	3,894,000	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	649,593,096,656	453,914,902,386	195,678,194,270	43.109
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	12,315,640,889	(1,764,262,079)	14,079,902,968	(798.06 2)
EKUITAS AKHIR	29,667,493,089	17,351,852,200	12,315,640,889	70.976

Keterangan :

FINAL

Lampiran XII
LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tgl.Data : 07/05/24 6:00 AM
Tanggal : 07/05/24 11:42 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	391,236,799
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	69,685,113
117199	Persediaan Lainnya	142,967,778
132111	Peralatan dan Mesin	93,889,973,772
134113	Jaringan	2,231,461,587
135121	Aset Tetap Lainnya	146,140,500
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(68,456,737,332)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,024,912,167)
162151	Software	4,884,433,200
162171	Hasil Kajian/Penelitian	5,318,010,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	888,502,632
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,205,008,172
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	5,622,045,027
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,205,008,172)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4,329,155,575)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(5,258,952,527)
J U M L A H		34,514,698,807

Lampiran XIII

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tanggal : 07/05/24 11:42 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	10,244	90,851,248,452	862	17,806,738,759	2,636	14,768,013,439	8,470	93,889,973,772
30103	ALAT BANTU	38	1,399,113,929	5	5,221,082,249	5	1,054,024,912	38	5,566,171,266
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	18	3,492,707,500	6	1,900,630,310	4	965,675,655	20	4,427,662,155
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	29	65,006,150	0	0	2	2,095,500	27	62,910,650
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	12	48,191,300	0	0	7	7,857,000	5	40,334,300
30303	ALAT UKUR	11	62,608,940	0	0	6	23,567,940	5	39,041,000
30501	ALAT KANTOR	1,435	11,467,114,343	151	1,134,292,256	475	1,929,167,467	1,111	10,672,239,132
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,609	31,459,013,159	372	2,374,315,994	1,250	5,255,401,875	4,731	28,577,927,278
30601	ALAT STUDIO	447	7,294,523,682	136	3,981,139,100	137	1,228,106,153	446	10,047,556,629
30602	ALAT KOMUNIKASI	565	1,578,646,908	0	0	407	559,944,968	158	1,018,701,940
30603	PERALATAN PEMANCAR	7	71,227,200	0	0	0	0	7	71,227,200
30701	ALAT KEDOKTERAN	62	917,203,590	0	0	3	39,900,000	59	877,303,590
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	10	150,356,800	1	22,300,000	2	136,400,000	9	36,256,800
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	4	16,082,000	1	7,900,000	2	9,867,000	3	14,115,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	13,358,400	0	0	0	0	1	13,358,400
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	4	68,056,000	0	0	0	0	4	68,056,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	2,510,000	0	0	1	2,510,000	0	0
30901	SENJATA API	0	0	1	2,800,000	1	2,800,000	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	2	90,747,580	2	90,747,580	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	1,179	21,264,375,845	111	1,933,779,850	163	2,236,859,217	1,127	20,961,296,478
31002	PERALATAN KOMPUTER	808	11,434,853,706	67	995,010,220	169	1,223,088,172	706	11,206,775,754
31501	ALAT DETEKSI	1	22,000,000	0	0	0	0	1	22,000,000
31503	ALAT SAR	1	3,280,000	0	0	0	0	1	3,280,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	2	21,019,000	9	142,741,200	0	0	11	163,760,200
134113	Jaringan	2	2,214,385,347	0	17,076,240	0	0	2	2,231,461,587
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	2,214,385,347	0	17,076,240	0	0	2	2,231,461,587
135121	Aset Tetap Lainnya	26	547,639,287	0	0	1	401,498,787	25	146,140,500
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	401,498,787	0	0	1	401,498,787	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	5	96,310,500	0	0	0	0	5	96,310,500
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	20	49,830,000	0	0	0	0	20	49,830,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	9	1,174,304,780	2,629	13,702,150,704	2,632	13,671,447,312	6	1,205,008,172
30103	ALAT BANTU	0	0	5	1,054,024,912	1	23,100,000	4	1,030,924,912
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	873,125,000	1	15,360,500	5	888,485,500	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	2	2,095,500	2	2,095,500	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	7	7,857,000	7	7,857,000	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	6	23,567,940	6	23,567,940	0	0

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tanggal : 07/05/24 11:42 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_kl

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30501	ALAT KANTOR	2	122,495,450	475	1,929,167,467	477	2,051,662,917	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	4,601,070	1,250	5,255,401,875	1,251	5,260,002,945	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	136	1,206,106,153	136	1,206,106,153	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	407	559,944,968	407	559,944,968	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	3	39,900,000	3	39,900,000	0	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0	2	136,400,000	2	136,400,000	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	2	9,867,000	2	9,867,000	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0	1	2,510,000	1	2,510,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	163	2,236,859,217	163	2,236,859,217	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	2	174,083,260	169	1,223,088,172	169	1,223,088,172	2	174,083,260
TOTAL			94,787,577,866		31,525,965,703		28,840,959,538		97,472,584,031

Lampiran XIV
LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM
Tanggal : 07/05/24 11:42 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_kl

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	455	208,553,805	159	93,057,550	47	9,396,250	567	292,215,105
30103	ALAT BANTU	0	0	4	3,445,000	0	0	4	3,445,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	1,870,000	0	0	0	0	2	1,870,000
30303	ALAT UKUR	5	200,000	0	0	0	0	5	200,000
30501	ALAT KANTOR	22	4,525,900	2	1,100,000	13	2,437,500	11	3,188,400
30502	ALAT RUMAH TANGGA	343	166,430,155	107	65,114,150	30	6,080,750	420	225,463,555
30601	ALAT STUDIO	29	18,335,400	11	8,246,900	1	198,000	39	26,384,300
30602	ALAT KOMUNIKASI	18	8,241,000	0	0	1	200,000	17	8,041,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	6	1,518,000	0	0	0	0	6	1,518,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	10	2,445,850	2	1,092,240	0	0	12	3,538,090
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	10	1,314,500	3	739,260	0	0	13	2,053,760
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	5	2,980,000	0	0	2	480,000	3	2,500,000
31503	ALAT SAR	5	693,000	0	0	0	0	5	693,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	30	13,320,000	0	0	30	13,320,000
135121	Aset Tetap Lainnya	1	100,000	0	0	1	100,000	0	0
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	1	100,000	0	0	1	100,000	0	0
60501	TANAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	48	9,496,250	48	9,496,250	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	13	2,437,500	13	2,437,500	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	30	6,080,750	30	6,080,750	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	1	198,000	1	198,000	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	1	200,000	1	200,000	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	2	480,000	2	480,000	0	0
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	0	0	1	100,000	1	100,000	0	0
TOTAL			208,653,805		102,553,800		18,992,500		292,215,105

Lampiran XV

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT KL

ASET TAK BERWUJUD

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tanggal : 07/05/24 11:42 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_kel_kl

UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	63	9,177,718,727	3	222,900,000	37	4,516,185,527	29	4,884,433,200
80101	ASET TAK BERWUJUD	63	9,177,718,727	3	222,900,000	37	4,516,185,527	29	4,884,433,200
162161	Lisensi	1	105,187,500	0	0	1	105,187,500	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	105,187,500	0	0	1	105,187,500	0	0
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	1	5,318,010,000	0	0	1	5,318,010,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	1	5,318,010,000	0	0	1	5,318,010,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	5	1,072,402,632	2	183,900,000	3	888,502,632
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	5	1,072,402,632	2	183,900,000	3	888,502,632
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	11	8,357,803,515	37	4,582,373,027	24	7,318,131,515	24	5,622,045,027
80101	ASET TAK BERWUJUD	11	8,357,803,515	37	4,582,373,027	24	7,318,131,515	24	5,622,045,027
TOTAL			17,640,709,742		11,195,685,659		12,123,404,542		16,712,990,859

Lampiran XVI

Monitoring dan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian s.d. 31 Desember 2023

**MONITORING TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2022**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Plafon Selasar Lantai 3 Gedung Ali Wardana Kemenko Perekonomian Sebesar Rp27.000.000,00.	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian agar memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas tagihan dan menguji kelengkapan serta kebenaran materiil dokumen tagihan.	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas KU.05.01/196/SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a) Memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum atas ketidakcermatannya. b) Memerintahkan PPK Biro Umum untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas tagihan dan menguji kelengkapan serta kebenaran materiil dokumen tagihan. Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembinaan melalui kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum melalui Nota Dinas Nomor PW.05.02/06/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas tagihan dan menguji kelengkapan serta kebenaran materiil dokumen tagihan. PPK telah melakukan penyetoran nomor NTPN 04E0855DF02639L5 dengan nilai sebesar Rp 27.000.000,00 tanggal 15 Mei 2023.	Juni 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2.	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun 2022 Sebesar Rp11.155.394,70.	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian agar : a) Memberikan pembinaan kepada Petugas Pengadministrasian Kepegawaian atas ketidacermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan Tukin; dan b) Memerintahkan PPK untuk melakukan penagihan dan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.155.394,70.	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas KU.05.01/197/SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a) Memberikan pembinaan kepada Petugas Pengadministrasian Kepegawaian atas ketidacermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan Tukin; dan b) Memerintahkan PPK untuk melakukan penagihan dan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.155.394,70 Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pembinaan melalui kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Pegawai melalui Nota Dinas Nomor PW.05.02/07/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar lebih cermat dalam melakukan perhitungan Tunjangan Kinerja dan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11.155.394,70. PPK Belanja Pegawai telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan nomor NTPN sebagai berikut: 37B1F1JNFMARO7JN sebesar Rp 2.734.000,00 tanggal 03 Desember 2023 - CD0FC55DF8VTTFIL sebesar Rp 2.734.000,00 tanggal 09 Januari 2024 230FB3CIFB9ESSOR sebesar Rp 78.739,00 tanggal 19 September 2023 - F61B20N9VR19LSU4 sebesar Rp	Juni 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			62.336,00 tanggal 19 September 2023 5. 76F116U8ELJ0GSFB sebesar Rp 2.734.000,00 tanggal 21 September 2023 6. D8EB10N9VRKRKJNU sebesar Rp 2.734.000,00 tanggal 09 Oktober 2023 7. 6FFB87QLUG1SUDBE sebesar Rp 78.320,00 tanggal 07 Agustus 2023 Total penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.155.395,00		
3.	Kewajiban Pada Kontrak PPNPN Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan, Terdapat Iuran BPJS Ketenagakerjaan PPNPN Pengemudi Pada Biro Umum yang Belum Dibayarkan Sebesar Rp5.513.822,00, dan Belum Seluruh PPNPN Berstatus Kepesertaan BPJS Kesehatan Aktif.	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian agar: a) Memerintahkan PPK pada masing-masing unit kerja mempedomani SE KPA Kemenko Perekonomian tentang Tenaga Pendukung di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyusun kontrak PPNPN; b) Memerintahkan PPK Biro Umum untuk menarik dan menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi sebesar Rp5.513.822,00; dan a. Memerintahkan PPK Biro Umum, Biro Perencanaan, Biro Lintas Sektoral, Deputi 4, Deputi 6, dan Deputi 7 mengikuti SE KPA Kemenko Perekonomian terkait kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Tenaga Pendukung PPNPN di lingkungan Kemenko Perekonomian.	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas KU.05.01/198/SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a) Memerintahkan PPK pada masing-masing unit kerja mempedomani SE KPA Kemenko Perekonomian tentang Tenaga Pendukung di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyusun kontrak PPNPN; b) Memerintahkan PPK Biro Umum untuk menarik dan menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan Pengemudi sebesar Rp5.513.822,00; dan c) Memerintahkan PPK Biro Umum, Biro Perencanaan, Biro Lintas Sektoral, Deputi 4, Deputi 6, dan Deputi 7 mengikuti SE KPA Kemenko Perekonomian terkait kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Tenaga Pendukung PPNPN di lingkungan Kemenko Perekonomian.	Juni 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Nota Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum, PPK Biro Perencanaan, PPK Lintas Sektor, PPK Deputi IV, PPK Deputi VI, dan PPK Deputi VII melalui Nota Dinas Nomor PW.05.02/04/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar mengikuti Surat Edaran KPA terkait kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Tenaga Pendukung PPNNP dan melakukan monitoring serta pengendalian atas keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Nota Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker 427752 melalui Nota Dinas Nomor PW.05.02/01/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar mempedomani Surat Edaran KPA tentang Tenaga Pendukung di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian dalam menyusun kontrak PPNNP. PPK telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan nomor NTPN 215F70N9VRHTUJGS dengan nilai sebesar Rp Rp5.513.822,00 tanggal 07 September 2023.		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
4.	Pembayaran Biaya Taksi dan Transportasi Darat Perjalanan Dinas Tidak Dilengkapi Dengan Bukti Pertanggungjawaban Sesuai Pengeluaran Minimal Senilai Rp143.355.850,00.	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian agar : a) Memberikan pembinaan kepada masing-masing PPK atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan pengujian atas tagihan pembayaran belanja perjalanan dinas; dan b) Menginstruksikan masing-masing PPK untuk menagih kepada pelaksana perjalanan dinas dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp143.355.850,00.	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas KU.05.01/199/SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a) Memberikan pembinaan kepada masing-masing PPK atas ketidakcermatannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan pengujian atas tagihan pembayaran belanja perjalanan dinas; dan b) Menginstruksikan masing-masing PPK untuk menagih kepada pelaksana perjalanan dinas dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp143.355.850,00. Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Nota Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi III, PPK Deputi V, PPK Deputi VII, dan PPK Deputi G20 melalui melalui Nota Dinas Nomor PW.05.02/05/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar lebih cermat dalam melakukan pengujian atas tagihan pembayaran belanja perjalanan dinas, menagih kepada pelaksana perjalanan dinas dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp 143.355.850,00. PPK telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan nomor NTPN sebagai berikut:	Juni 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			1) 6F3DD1JNFUMITDMV sebesar Rp 70.000,00 tanggal 10 Januari 2024. 2) 5837655DF0JPP04V sebesar Rp 5.229.200,00 tanggal 06 November 2023. 3) AFE6A55DF0K808I1 sebesar Rp 38.806.250,00 tanggal 21 November 2023. 4) BFCD148VV64CGMH4 sebesar Rp 44.370.000,00 tanggal 06 Desember 2023. 5) 1FCA70N9VRRRA7G8 sebesar Rp 15.740.000,00 tanggal 22 Desember 2023. 6) D567B7QLUGELQK5G sebesar Rp 39.140.400,00 tanggal 31 Desember 2023. Total penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp 143.355.850,00.		
5.	Kemenko Perekonomian Berpotensi Tidak Memperoleh Harga Sewa Laptop yang Paling Menguntungkan	BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian agar: a) Memberikan pembinaan kepada PPBJ atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam memperhatikan jenis dan spesifikasi laptop dalam tahap klarifikasi dan negosiasi harga sewa; dan b) Menginstruksikan kepada masing-masing PPK terkait agar berkoordinasi dengan PPBJ dalam upaya menghasilkan harga sewa laptop yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sesmenko Perekonomian telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas KU.05.01/200/SES.M.EKON/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk: a) Memberikan pembinaan kepada PPBJ atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam memperhatikan jenis dan spesifikasi laptop dalam tahap klarifikasi dan negosiasi harga sewa; dan b) Menginstruksikan kepada masing-masing PPK terkait agar berkoordinasi dengan PPBJ dalam upaya menghasilkan	Juni 2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			harga sewa laptop yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Menindaklanjuti Nota Dinas tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Nota Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum, PPK Deputi II, dan PPK Deputi IV melalui melalui Nota Dinas Nomor PW.05.02/03/SET.M.EKON.1/09/2023 tanggal 5 September 2023 agar berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dalam upaya menghasilkan harga sewa laptop yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Plt. Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) melalui Nota Dinas Nomor PW.05.02/636/SET.M.EKON.4/09/2023 tanggal 1 September 2023 agar memberikan pembinaan kepada PPBJ atas ketidakcermatannya dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam memperhatikan jenis dan spesifikasi laptop dalam tahap klarifikasi dan negoisasi harga sewa.		

**MONITORING TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2021**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kemenko Perkonomian Belum Memadai	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang untuk: - Melakukan inventarisasi BMN Aset Tetap secara berkala termasuk dalam memperbaharui kode ruangan atas BMN Aset Tetap ketika terjadi pemindahan BMN Aset Tetap; - Menginstruksikan UAKPB untuk melengkapi label kodefikasi seketika BMN telah dicatat pada aplikasi SIMAK-BMN dan membuat perencanaan atas pengadaan label kodefikasi lebih terorganisir agar tidak terjadi kehabisan label Ketika BMN akan ditandai label kodefikasi; dan - Menginstruksikan Kepala Rumah Tangga untuk menetapkan status dari BMN yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: ▪ Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang melalui surat nomor KU.5.1-846/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar: - Melakukan inventarisasi BMN Aset Tetap secara berkala termasuk dalam memperbaharui kode ruangan atas BMN Aset Tetap ketika terjadi pemindahan BMN Aset Tetap; - Melengkapi label kodefikasi seketika BMN telah dicatat pada aplikasi SIMAK-BMN dan membuat perencanaan atas pengadaan label kodefikasi lebih terorganisir agar tidak terjadi kehabisan label Ketika BMN akan ditandai label kodefikasi. ▪ Berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang mengintruksikan kepada Kepala Rumah Tangga melalui surat Nomor KU.5.1-499/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 September 2022 untuk menetapkan status dari BMN yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. ▪ Telah dilakukan penyerahan BMN Kemenko Perekonomian berdasarkan BAST No. BASTBMN-01/SET.M.EKON/07/2022 dari Sesmenko selaku PB kepada Ketua Koperasi Pegawai Kantor Kemenko Perekonomian	2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2.	Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Perorangan sebesar Rp3.002.363.636,00 Belum Sesuai dengan Ketentuan	Sesmenko agar: - Menegur KPA agar lebih cermat dalam mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan atas tenaga ahli yang bersifat rutin; - Menegur PPK terkait agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan; dan - Menyusun peraturan terkait besaran standar remunerasi/penghasilan untuk belanja jasa konsultansi perorangan.	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: - Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat Nomor KU.5.1-848/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar: - lebih cermat dalam mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan atas tenaga ahli yang bersifat rutin; - melakukan pembinaan kepada PPK terkait agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan. - Berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang mengintruksikan kepada PPK KPPIP dan PPK Biro KLIP melalui surat Nomor KU.5.1-500/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 September 2022 untuk: a) lebih cermat dalam mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan atas tenaga ahli yang bersifat rutin dan b) agar pemilihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh beberapa calon penyedia dan kualifikasi atas tenaga ahli lebih umum dan cenderung tidak mengarah kepada satu penyedia sehingga tercipta pemilihan yang transparan. - Sesmenko Bidang Perekonomian juga mengintruksikan kepada Kepala Biro Perencanaan melalui surat nomor KU.5.1-847/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2	2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			September 2022 untuk menyusun peraturan terkait besaran standar remunerasi/penghasilan untuk belanja jasa konsultansi perorangan.		
3.	Belanja Sewa Peralatan Kantor yang Tidak Efisien sebesar Rp610.087.200,00 di Antara Terdapat Kelebihan Bayar sebesar Rp2.160.000,00	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk: - Menginstruksikan PPK Deputy 4 menagih kelebihan pembayaran belanja sewa sebesar Rp2.160.000,00 serta lebih cermat dalam menyusun HPS belanja sewa peralatan kantor; dan - Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran belanja barang dan belanja modal di satuan kerjanya.	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: - Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat Nomor KU.5.1-849/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar: - Menginstruksikan PPK Deputy 4 menagih kelebihan pembayaran belanja sewa sebesar Rp2.160.000,00 serta lebih cermat dalam menyusun HPS belanja sewa peralatan kantor; dan - Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran belanja barang dan belanja modal di satuan kerjanya. - Berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang mengintruksikan kepada PPK D.IV melalui surat Nomor KU.5.1-501/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 September 2022 untuk menagih kelebihan pembayaran belanja sewa sebesar Rp2.160.000,00 serta lebih cermat dalam menyusun HPS belanja sewa peralatan kantor. - Penyedia jasa kemudian melakukan penyetoran kelebihan pembayaran belanja sewa sebesar Rp2.160.000,00 pada tanggal 19 Mei 2022 dengan bukti setor NTPN Nomor: 7C24B2G4V712GBOQ.	2024	Dalam Proses Tindak Lanjut
4.	Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Lainnya Kegiatan <i>Media</i>	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk:	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut:	2024	Dalam Proses

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	<i>Placement</i> pada Biro Perencanaan sebesar Rp33.810.000,00	a. Menginstruksikan PPK untuk menagih kelebihan pembayaran atas belanja jasa lainnya kegiatan <i>media placement</i> sebesar Rp33.810.000,00 serta cermat dalam melakukan penelitian dan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penagihan; dan b. Menyusun pedoman berdasarkan ketentuan yang berlaku atas kegiatan publikasi khususnya <i>media placement</i>.	- Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat Nomor KU.5.1-850/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar menginstruksikan PPK Biro Perencanaan untuk menagih kepada penyedia jasa atas kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya kegiatan <i>media placement</i> sebesar Rp33.810.000,00 serta agar lebih cermat dalam melakukan penelitian dan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penagihan; - Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan (KLIP) melalui surat Nomor KU.5.1-851/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar menyusun pedoman berdasarkan ketentuan yang berlaku atas kegiatan publikasi khususnya <i>media placement</i>; - Telah ditetapkan Alur Pelaksanaan Publikasi Konten Melalui Kersama Media di Lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian melalui surat nomor SE-20/SES.M.EKON/12/2022 yang ditetapkan oleh Sesmenko Bidang Perekonomian tanggal 30 Desember 2022 - Berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang mengintruksikan kepada PPK Biro Perencanaan melalui surat Nomor KU.5.1-502/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar menginstruksikan kepada penyedia jasa terkait atas kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya kegiatan <i>media placement</i> sebesar Rp33.810.000,00, serta agar lebih cermat dalam melakukan		Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			penelitian dan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penagihan. Penyedia jasa kemudian melakukan penyetoran kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya kegiatan media placement sebesar Rp33.810.000,00 pada tanggal 20 September 2022 dengan bukti setor NTPN Nomor: ABB962G4V7414RO0.		
5.	Terdapat Lebih Bayar atas Realisasi Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp25.690.000,00 atas pengadaan jasa <i>Professional Conference Organizer</i> (PCO) Presidensi G20 Indonesia	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk: - Menginstruksikan PPK Deputy 7 untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas Belanja Jasa Lainnya dan menagih kelebihan pembayaran atas jasa tenaga medis antigen kru dan <i>driver</i> sebesar Rp25.690.000,00; dan - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan di satuan kerjanya.	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: - Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat Nomor KU.5.1-852/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar: - Menginstruksikan PPK Deputy 7 untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap Belanja Jasa Lainnya dan menagih penyedia jasa atas kelebihan pembayaran atas jasa tenaga medis antigen kru dan <i>driver</i> sebesar Rp25.690.000,00; dan - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan di satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. - Berdasarkan hal tersebut, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran menginstruksikan kepada PPK Deputy 7 melalui surat nomor KU.5.1/503/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 02 September 2022 agar: - Lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap Belanja Jasa Lainnya dan menagih kepada penyedia jasa terkait atas kelebihan pembayaran	2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			atas jasa tenaga medis antigen kru dan driver sebesar Rp25.690.000,00; dan b. Lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran. Penyedia jasa kemudian melakukan penyetoran kelebihan pembayaran belanja jasa lainnya sebesar Rp25.690.000,00 pada tanggal 06 September 2022 dengan bukti setor NTPN Nomor: F32027QLU6FOLDD8.		
6.	Terdapat indikasi Pemecahan Kontrak atas beberapa paket Belanja Modal pada Biro Umum sebesar Rp4.179.105.810,00	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk: a. Menegur PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan; dan b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan di satuan kerjanya. c. Menginstruksikan PPK untuk mempertanggungjawabkan selisih harga pengadaan barang sebesar Rp123.907.500,00	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: - Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat Nomor KU.5.1-853/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar: - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan di satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Memberikan pembinaan kepada PPK Biro Umum agar lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan; dan - Menginstruksikan PPK Biro Umum untuk menyampaikan penjelasan dan bukti pendukung pertanggungjawaban kepada pihak Inspektorat atas selisih harga pengadaan barang sebesar Rp123.907.500,00. - Berdasarkan hal tersebut, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran menginstruksikan kepada PPK Biro Umum melalui surat nomor	2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			KU.5.1/504/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 02 September 2022 agar: a. Lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran; b. Lebih cermat dalam menyusun HPS serta agar tidak memecah paket pekerjaan untuk menghindari pelelangan; dan c. Menyampaikan penjelasan dan bukti pendukung pertanggungjawaban kepada pihak Inspektorat atas selisih harga pengadaan barang sebesar Rp123.907.500,00. ▪ Penyaampaian penjelasan dan buktinya pendukung pertanggungjawaban harga meubelair telah disampaikan oleh Kepala Biro Umum kepada Inspektorat melalui surat nomor PW.02.01/988/SES.M.EKON.4/12/2022 tanggal 30 Desember 2022		
7.	Terdapat Pemecahan Paket, Kesalahan Anggaran dan Realisasi, Serta Kekurangan Volume Sebesar Rp75.599.000,00 atas Enam Paket Pekerjaan Canopy	Sesmenko memerintahkan Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk: a. Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal; dan b. Menginstruksikan PPK Sekretariat I agar lebih cermat dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah sebagai berikut: ▪ Sesmenko Bidang Perekonomian telah mengintruksikan kepada Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui surat Nomor KU.5.1-854/SES.M.EKON/06/2022 tanggal 2 September 2022 agar: a. Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal; dan b. Menginstruksikan PPK Sekretariat I agar lebih cermat dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa. ▪ Berdasarkan hal tersebut, kemudian Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran	2024	Dalam Proses Tindak Lanjut

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Perkembangan Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			menginstruksikan kepada PPK Biro Umum melalui surat nomor KU.5.1/505/SET.M.EKON.4/06/2022 tanggal 02 September 2022 agar: a. Lebih cermat dalam merencanakan penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal; dan b. Lebih cermat dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa.		

**MONITORING TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Tanggapan dan Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Ket
1.	Belanja Jasa Konsultasi Pelaksanaan Diagnosis Kesiapan Pendistribusian Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Sehat Tahun 2020 Belum Sesuai dengan Ketentuan	Sesmenko agar: 1. Memberikan teguran secara tertulis kepada PPK untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian kontrak; dan 2. Melakukan pengaturan di Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) terkait pengendalian pertanggungjawaban kegiatan dalam pengadaan jasa konsultasi.	Berdasarkan rekomendasi dimaksud, dilakukan langkah: ▪ Menko Perekonomian atas nama Sesmenko Perekonomian telah mengintruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 5032 melalui surat Nomor KU.5.1-153/M.EKON/06/2021 tgl 16 September 2021, untuk: 1. lebih cermat dalam melakukan pengendalian kontrak; dan 2. Melakukan pengaturan di Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) terkait pengendalian pertanggungjawaban kegiatan dalam pengadaan jasa konsultasi, untuk menghindari terjadinya permasalahan yang sama pada periode berikutnya. • Dalam rangka pengendalian dan pertanggungjawaban kegiatan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, bahwasanya dilakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis sebagai berikut: a. Pembinaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 23 September 2021, yang ditujukan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf PPK dan Seluruh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) melalui surat Nomor BM.1/203/SET.M.EKON.4/09/2021 Tanggal 20 September 2021; b. Pembinaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 24 September 2021, yang ditujukan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf PPK dan Seluruh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Pokja melalui surat Nomor BM.1/204/SET.M.EKON.4/09/2021 Tanggal 20 September 2021.	2024	Belum sesuai

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat
Kode Pos 10710
Telp : (021) 3522003
Fax : (021) 3511467
Web : www.ekon.go.id

